

**ANALISA PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEMISKINAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL  
ANTESEDEN (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota  
Provinsi Sumatera Selatan)**



**SKRIPSI**

Oleh:

Nama : Hendry Wijaya

Nomor Mahasiswa : 08312002

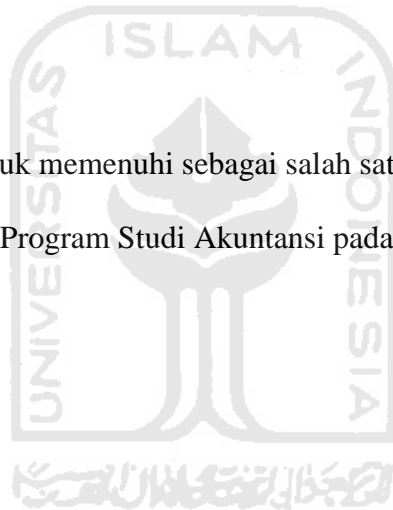
**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2011**

**ANALISA PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEMISKINAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL  
ANTESEDEN (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota  
Provinsi Sumatera Selatan)**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII



Oleh:

Nama : Hendry Wijaya

Nomor Mahasiswa : 08312002

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam refrensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



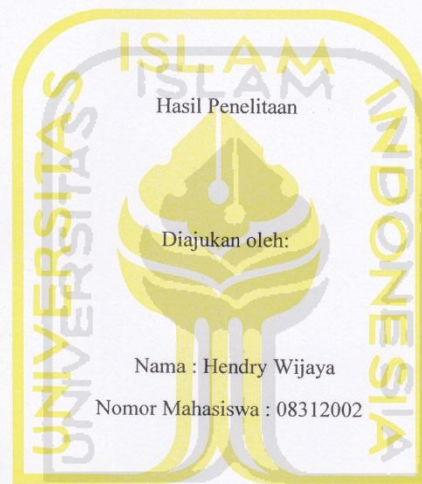
Yogyakarta, 13 Januari 2012

Penyusun,



(Hendry Wijaya)

**ANALISA PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP  
PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEMISKINAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL  
ANTESEDEN (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota  
Provinsi Sumatera Selatan)**



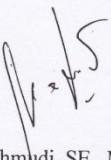
Nama : Hendry Wijaya

Nomor Mahasiswa : 08312002

الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّبِّ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ  
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 13 Januari 2012

Dosen Pembimbing

  
Mahmudi, SE., M.Si.

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran  
Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan Dengan Kinerja  
Keuangan Sebagai Variabel Anteseden (Studi kasus Pada Pemerintah  
Daerah di Kabupate/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Disusun Oleh: **HENDRY WIJAYA**  
Nomor Mahasiswa: **08312002**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada tanggal : 13 Februari 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Mahmudi, SE, M.Si, Ak

Penguji I : Dra. Isti Rahayu, M.Si, Ak

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

## HALAMAN MOTTO

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.

Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.”

**- Andrew Jackson**

“..... Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”

**(QS, Ali Imran:191)**

“GOD answers prayer in 3 ways: HE says YES and gives you what you want. HE says NO and gives you BETTER. HE says WAIT and gives you the BEST.”

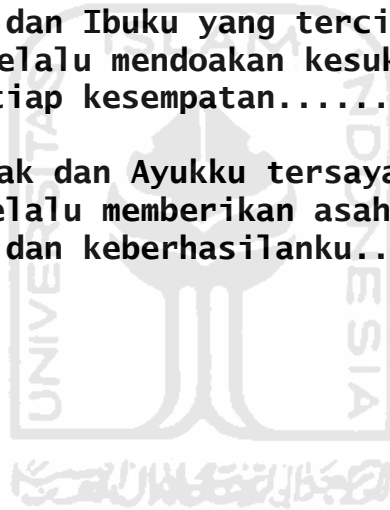
**- Penulis**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Seiring rasa syukurku kepada ALLAH SWT, karya ini  
kupersembahkan untuk:**

**Ayah dan Ibuku yang tercinta,  
yang selalu mendoakan kesuksesan  
anaknya disetiap kesempatan.....**

**Kakak dan Ayukku tersayang  
yang selalu memberikan asahan dan  
semangat dan keberhasilanku.....**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr Wb.*

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis diberi kekuatan, ketabahan, kemudahan, kelancaran dan ketenangan berfikir dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISA PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEMISKINAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL ANTESEDEN (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan).”**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir program S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari banyak pihak, penyelesaian skripsi ini akan dipenuhi dengan banyak hambatan dan permasalahan. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA, DBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.



2. Ibu Dra. Isti Rahayu, M.Si, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Mahmudi, SE., M.Si. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ayah dan Ibuku, yang selalu mendoakan kesuksesan anaknya di setiap detik waktu.
5. Kakak dan Ayukku, yang terus mensupport saya dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
6. Keluarga saya, Yuk Vivin dan Her Boyfriend yang telah membantu saya dalam mengambil data di Palembang, terima kasih banyak.
7. Sahabatku Dita, Aminx, Pacu, Hafiz, Fariz, dan Irma yang selama ini menemaniku mengisi hari-hari di Yogyakarta baik suka maupun duka. Don't forget me yah friends kalau udah punya kehidupan masing-masing nantinya, sukses semuanya Amin Ya Robbal Alamin.
8. Teman-teman KKN Unit 9 Reguler 1 Tahun 2010/2011 Tunjung, Lini, Karlina, Cindy, Adit dan Ade, senang bisa kenal kalian guys dan sempat hidup bersama susah senang selama satu bulan di Selo, Boyolali.
9. Teman-teman kuliah di FE UII yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas saran, info, sharing dan bantuan yang telah diberikan demi kelancaran skripsi saya.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia dengan kelebihan dan kekurangannya, masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu karya yang berguna bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Yogyakarta, 13 Januari 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	8
I.3 Batasan Masalah .....	8
I.4 Tujuan Penelitian .....	9
I.5 Manfaat Penelitian .....	10
I.6 Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
II.1 Kinerja Keuangan .....	12

II.1.1 Rasio Kemandirian .....	13
II.1.2 Rasio Efektifitas .....	14
II.1.3 Rasio Efisiensi .....	15
II.1.4 SiLPA .....	16
II.1.5 Pertumbuhan PAD .....	17
II.1.6 Pertumbuhan APBD .....	22
<b>II.2 Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Indeks</b>	
Pembangunan Manusia dan Kemiskinan .....	32
II.2.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	32
II.2.2 Pengangguran.....	35
II.2.3 Indeks Pembangunan Manusia .....	38
II.2.4 Kemiskinan .....	42
<b>II.3 Keterkaitan Antara Kinerja Keuangan Dengan</b>	
<b>Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Indeks</b>	
Pembangunan Manusia dan Kemiskinan.....	44
II.3.1 Hubungan Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan	
Ekonomi .....	44
II.3.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan	
Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia	
dan Kemiskinan .....	51

### **BAB III METODE PENELITIAN**

II.1 Jenis Penelitian .....	56
III.2 Populasi dan Sampel .....	56
III.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	57
III.4 Desain Penelitian .....	58
III.5 Pengukuran Variabel Penelitian .....	59
III.6 Identifikasi Variabel .....	62
III.7 Teknik Analisis .....	63

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

IV.1 Analisis Deskriptif .....	66
IV.2 Analisis Statistik .....	69
IV.2.1 Uji Kebaikan Model .....	69
IV.2.2 Pengujian Struktur Model .....	72
IV.3 Pengaruh Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah .....	73
IV.4 Pengaruh Efektifitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah .....	74
IV.5 Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah .....	75
IV.6 Pengaruh SiLPA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah ....	76

IV.7 Pengaruh Pertumbuhan PAD Terhadap Pertumbuhan	
Ekonomi Daerah .....	76
IV.8 Pertumbuhan APBD Terhadap Pertumbuhan	
Ekonomi Daerah .....	77
IV.9 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat	
Pengangguran .....	79
IV.10 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks	
Pembangunan Manusia .....	79
IV.11 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat	
Kemiskinan .....	81
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
V.1 Kesimpulan .....	83
V.2 Keterbatasan Penelitian .....	84
V.3 Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Efektifitas Keuangan Daerah	15
Tabel 2.2	Efisiensi Keuangan Daerah	17
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif	67
Tabel 4.2	Goodness of Fit Index	71
Tabel 4.3	Estimasi Hasil Analisis SEM	74



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Desain Penelitian	60
Gambar 4.1.	Hasil Diagram Jalur Output AMOS	73





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2008
2. Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2008
3. PDRB atas harga konstan 2000 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2008
4. Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2008
5. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2008
6. Persentase Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2008
7. Target dan Realisasi PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2008
8. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2008
9. SiLPA di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006-2008
10. Total APBD di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2008
11. Hasil Olah Data
12. Surat Permohonan Izin Penelitian

## Abstraksi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh langsung variabel kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan untuk memeriksa secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran, produk domestik regional bruto, jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan jumlah penduduk tidak bekerja tahun 2006-2008 pada empat belas kota/kabupaten di Sumatera Selatan. Pemilihan provinsi Sumatera Selatan karena penelitian mengenai keuangan daerah masih jarang dilakukan untuk daerah yang berada di luar Pulau Jawa. Model dalam penelitian ini adalah model kausalitas (hubungan/pengaruh sebab akibat), maka untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan alat uji Model Persamaan Struktural (Structural Equation Model – SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan terdiri dari kemandirian, efisiensi, pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan APBD secara langsung memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara rasio efektivitas dan SiLPA secara langsung belum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Namun pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif signifikan pada tingkat pengangguran.

## Abstract

The purpose of this study was to test the direct influence of financial performance variables on economic growth, and to examine directly the effect of economic growth on poverty, human development index, and unemployment. The data used in this study is to report the realization of the budget, the regional gross domestic product, the number of poor people, the human development index, and the number of residents do not work in 2006-2008 in fourteen cities / counties in South Sumatra. South Sumatra provincial elections because research on local finance is still rarely carried out for areas outside Java. The model in this study is model of causality (relationship/causal influence), then to test the hypothesis test equipment used Structural Equation Model (Structural Equation Model – SEM). The results showed that the financial performance variables consisted of self-reliance, efficiency, revenue growth, and growth of direct budget has a significant positive effect on economic growth, while the ratio of effectiveness and direct Silpa not significantly influence economic growth. In the direct economic growth has positive significant effect on the Human Development Index, and economic growth have a significant negative impact on poverty levels. But economic growth isn't significantly negative effect on the unemployment rate.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Reformasi di segala bidang yang di dukung oleh masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah menyebabkan lahirnya otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi.

Indonesia memasuki Era Otonomi Daerah dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004 ) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu juga dilaksanakan pula dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam

penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat: (1) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, (3) membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002).

Dalam otonomi daerah, pimpinan daerah memegang peran sangat strategis dalam mengelola dan memajukan daerah yang dipimpinnya. Perencanaan strategis sangat vital, karena disanalah akan terlihat dengan jelas peran kepala daerah dalam mengkoordinasikan semua unit kerjanya. Betapapun besarnya potensi suatu daerah, tidak akan optimal pemanfaatannya bila Bupati/Walikota tidak mengetahui bagaimana mengelolanya. Sebaliknya, meskipun potensi suatu daerah kurang, tetapi dengan strategi yang tepat untuk memanfaatkan bantuan dari pusat dalam memberdayakan daerahnya, maka akan semakin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 156 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itulah, perlu kecakapan yang tinggi bagi pimpinan daerah agar pengelolaan dan terutama alokasi dari keuangan daerah

dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah.

Otonomi daerah harus diikuti dengan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi menyangkut pembaruan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif transparan, dan akuntabel sesuai dengan cita-cita reformasi yaitu menciptakan *good governance* benar-benar tercapai.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah, baik struktur maupun infrastrukturnya. Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, misalnya *new public management* yang berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Penggunaan paradigma *new public management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah. Di antaranya perubahan pendekatan dalam dalam penganggaran, yakni dari penganggaran tradisional (*traditional budget*) menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance budget*), tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetensi tender (*compulsory competitive tendering contract*).

Sejalan dengan perlunya dilakukan reformasi sektor publik, diawal periode otonomi daerah, telah keluar sejumlah peraturan pemerintah (PP) sebagai operasionalisasi dari Undang-Undang Otonomi Daerah. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan daerah selama ini menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (*sustainable*) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

Adapun kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menurut pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, kemudian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh masing-masing kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah harus mengedepankan Transparansi di mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah.

Selain itu, Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Priyo Hari Adi (2006) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Ini menunjukkan bahwa semakin besar PAD suatu daerah maka ikut menaikkan pertumbuhannya. Dari penelitian yang telah dilakukan Darwanto dan Yulia Yustika Sari (2007) menunjukkan bahwa Tingkat Kemandirian Daerah setelah otonomi tidak lebih baik daripada sebelum otonomi dan Tingkat Aktivitas Belanja Pembangunan setelah otonomi tidak lebih baik dibandingkan sebelum otonomi. Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deddy (2003), yang mengemukakan bahwa PAD dan Peran PAD terhadap APBD di Indonesia dalam era otonomi semakin meningkat. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan temuan Priyo Hari Adi (2005) yang menunjukkan adanya perbedaan komposisi belanja pembangunan yang lebih baik dalam era sesudah otonomi dibanding dengan komposisi belanja yang sama sebelum otonomi.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara, kewenangan pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Dengan demikian pemerintah daerah berhak untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD ke DPRD masing-masing. Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah diatur



dalam Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Laporan keuangan dimaksud mencakup laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan daerah.

Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

Penelitian tentang pertumbuhan masih jarang dilakukan di daerah luar Pulau Jawa khususnya pada Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dengan melihat hubungan dari kinerja keuangannya dan pengaruhnya terhadap pengangguran, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Iwan Darmawan dengan judul yang sama pada 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi pada penelitian kali ini peneliti menambahkan Indeks Pembangunan Manusia dan dua lagi kinerja keuangan, yaitu Pertumbuhan

PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Pertumbuhan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Sampel yang digunakan pada penelitian kali ini terbatas hanya pada daerah di Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memutuskan untuk memberi judul penelitian ini: **“ANALISA PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEMISKINAN DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL ANTESEDEN (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan).”**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Pokok Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
- 2) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan?

## **I.3 Batasan Masalah**

Batasan Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu: rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, SiLPA, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
2. Pengambilan data dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Data yang digunakan adalah data dari tahun 2006 hingga 2008.

#### **I.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Menguji pengaruh kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari variabel rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, SiLPA, pertumbuhan PAD dan pertumbuhan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 2) Menguji pengaruh dari pertumbuhan ekonomi tersebut terhadap pengangguran, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.
- 3) Menguji pengaruh secara tidak langsung dari kinerja keuangan terhadap pengangguran, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

## **I.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan bisa diambil dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Penulis**

Penulis memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan dalam mempraktekan ilmu dan teori yang diperoleh selama kuliah.

### **2. Bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**

Memberikan bukti adanya pengaruh dari kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan terhadap pengangguran, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan di daerahnya. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat juga menjadi bahan evaluasi tentang kebijakan keuangan daerah.

### **3. Bagi Kalangan Akademis**

Dapat digunakan sebagai acuan dan refrensi awal untuk melakukan penelitian selanjutnya bagi para peneliti di bidang kinerja keuangan daerah. Sehingga diharapkan berguna untuk memperluas cakrawala dan tambahan informasi bagi para akademisi guna menemukan dimensi-dimensi baru dalam bidang ilmu keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **I.6 Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan urutan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah penulisan skripsi ini, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: KAJIAN TEORI**

Bab ini menguraikan mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan telaah teori yang mendasari penelitian ini. Menjelaskan pengertian kinerja keuangan, teori-teori dan pengertian dari kinerja keuangan yang digunakan, dan hubungan kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pada bab ini membahas pengembangan hipotesa penelitian.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan metode analisis untuk memperoleh jawaban dari masalah yang telah dirumuskan.

### **BAB VI: ANALISIS DATA**

Bab ini membahas tentang analisis data, dan menjelaskan temuan-temuan dalam analisa dan membuktikan hipotesa terbukti atau tidak.

### **BAB VIII: PENUTUP**

Bab ini terdiri atas kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **II.1 Kinerja Keuangan**

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Penilaian kinerja pada dasarnya adalah penilaian perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang dimainkannya dalam mencapai tujuan pribadi maupun organisasi. Sedangkan penilaian kinerja keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian. Namun pada penelitian kali ini kinerja keuangan yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, SiLPA, pertumbuhan PAD dan pertumbuhan APBD.

### II.1.1 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

## II.1.2 Rasio Efektifitas

Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan untuk dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Rasio efektifitas diukur dengan:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Nilai efektifitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007). Apabila persentase kinerja keuangan diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100% adalah efektif, 80% - 90% adalah cukup efektif, 60% - 80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.

**Tabel 2.1**

### **Efektifitas Keuangan Daerah**

>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif



### II.1.3 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Rasio efisiensi diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% ke atas dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% adalah kurang efisien, 80% - 90% adalah cukup efisien, 60% - 80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

**Tabel 2.2**

**Efisiensi Keuangan Daerah**

>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Cukup Efisien
<60%	Sangat Efisien

Faktor penentu efisiensi dan efektifitas sebagai berikut (Budiarto, 2007): a. Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan; b. Faktor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik itu struktural maupun fungsional; c. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan; d. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat; e. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

#### **II.1.4 SiLPA**

Pos Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam laporan realisasi anggaran merupakan sisa lebih anggaran tahun lalu. Pada umumnya SiLPA akan menjadi alternatif pertama yang akan digunakan pemerintah daerah apabila terjadi defisit anggaran. Jumlah dan SiLPA dapat diketahui pada akhir periode anggaran, yaitu 31 Desember.

Secara teoritis SiLPA pada akhir tahun anggaran dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{SiLPA} = \text{Realisasi Penerimaan} - \text{Realisasi Pengeluaran}$$

SiLPA merupakan kas bebas yang belum terikat penggunaannya. Penggunaan SiLPA dilakukan terikat dengan adanya kebijakan anggaran defisit atau karena adanya perubahan anggaran. SiLPA merepresentasikan sisa kas yang timbul karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah. Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah.

### **II.1.5 Pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah)**

Salah satu bentuk penerimaan daerah adalah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada era sebelum otonomi daerah dimana sistem pemerintahan masih berbentuk sentralisasi ternyata membawa dampak yang kurang baik pada pembangunan daerah. Hal ini dapat terlihat dengan terhambatnya kebebasan daerah dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh daerahnya dan dampak lain yang tak kalah merugikannya adalah tingginya tingkat ketergantungan.

PAD merupakan pendapatan yang menjadi hak untuk dinikmati oleh daerah otonom dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang dimilikinya.

Besarnya PAD yang diperoleh mencerminkan daerah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Menurut Abdul Halim (2002), dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-lain.

Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti yang diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi yang bersumber dari:

- Pajak Daerah.
- Retribusi Daerah.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- Lain-lain PAD yang sah.

#### i. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang diperoleh dari orang pribadi atau badan. Mardiasmo (2004) menyatakan

pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan kata lain pajak digunakan untuk memenuhi fasilitas publik sehingga meningkatkan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik.

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, dirinci menjadi:

a. Pajak Propinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukiman.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.

3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
7. Pajak Parkir.

## ii. Retribusi

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU No. 34 tahun 2000 dan PP No. 66 tentang retribusi daerah, retribusi daerah dapat dikelompokkan:

1. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Seperti: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan lain-lain.

2. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil, seperti: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyebrangan di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan lain-lain.

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, seperti: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan lain-lain.

iii. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Setiap Daerah mempunyai hak untuk memajukan daerahnya dengan menggunakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan perusahaan daerah

maupun kekayaan setiap daerah yang dimiliki. Undang-Undang mengizinkan daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi pembangunan. Kontribusi tersebut dapat berupa dividen yang dibayarkan kepada daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan daerah yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah. Jenis pendapatan yang tergolong dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini antara lain, bagian laba, dividen dan penjualan saham milik daerah dan lain-lain.

#### iv. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Yang termasuk dalam penerimaan lain-lain PAD yang sah antara lain: hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah dinas, penerimaan atas kekayaan daerah, sumbangan pihak ketiga, penerimaan jasa giro (kas daerah) dan lain-lain.

### **II.1.6 Pertumbuhan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)**

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan bentuk Peraturan Daerah. Perhitungan anggaran daerah (perhitungan APBD) adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD. APBD di satu pihak menggambarkan perhitungan atas perkiraan dan realisasi pengeluaran, dan di pihak lain menggambarkan perhitungan atas perkiraan dan realisasi pendapatan daerah dalam membiayai program dan kegiatan



daerah pada satu anggaran tertentu (Mamesah, 1995 : 140) (dalam Abdullah dan Halim, 2003). APBD merupakan instrumen utama untuk melaksanakan kebijakan dalam satu tahun anggaran. APBD dalam penyusunannya melibatkan berbagai pihak yang berkompeten.

Perbedaan substansial antara era sebelum otonomi dengan era otonomi daerah adalah bahwa kalau sebelumnya dominasi eksekutif sangat besar dan hampir menafsirkan peran DPRD dan masyarakat dalam menyusun APBD, berubah ke penyusunan anggaran yang harus mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian penyusunannya harus melibatkan DPRD dan masyarakat secara aktif. Untuk itu perlu di buat aturan main antara ketiga pihak sehingga hak dan kewajibannya jelas, dan karena APBD merupakan operasionalisasi dari berbagai kebijakan yang ditetapkan, maka harus mencerminkan suatu kesatuan sistem perencanaan yang sistematis dan dapat dianalisis keterkaitan/benang merahnya dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu sangat penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan publik dalam memahami sistematika perencanaan yang bermuara pada anggaran. Dari sisi aturan, maka mekanisme penyusunan anggaran khususnya APBD di atur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. Aturan ini kemudian mengalami penyempurnaan dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Walaupun ada perbedaan dalam perencanaan anggaran,

namun perbedaannya tidaklah signifikan. Dari berbagai peraturan perundangan tersebut pada prinsipnya penyusunan APBD haruslah mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*, misalnya akuntabilitas, transparansi, responsifitas, efektif, efisien, partisipatif dan lain-lain. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip tersebut maka disusunlah alur perencanaan anggaran.

Proses penyusunan Anggaran dimulai dengan adanya Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) antara Eksekutif dan DPRD, karena dalam bentuk Nota Kesepakatan, maka peran dua belah pihak adalah sama. Artinya baik eksekutif maupun DPRD harus sama-sama mencari sumber dan data-data untuk menyusun KUA. KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan KUA didasarkan kepada rencana strategis (Renstra) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang merupakan kebijakan suatu pemerintahan dalam periode tertentu/rezim. Renstra tersebut kemudian dikembangkan menjadi Renja (Rencana Kerja) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pertahun. Dokumen Renja setiap SKPD ini akan dikompilasikan oleh pemda menjadi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disusun juga harus mempertimbangkan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Selain KUA juga terdapat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan operasional masing-masing unit kerja dalam menyusun kegiatannya. PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan RKA-SKPD. Kebutuhan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah karena keterbatasan anggaran dan diperlukan adanya program dan kegiatan yang tepat untuk mencapai kebijakan yang telah ditentukan. Setelah ada KUA dan PPAS, maka keduanya harus dioperasionalkan dalam bentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. RKA-SKPD inilah dokumen yang paling operasional dalam proses penyusunan APBD. Apalagi dengan sistem anggaran kinerja, suatu kebijakan dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja, seperti *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*, yang kemudian dilengkapi dengan tolak ukur kinerja dan target kerjanya. RKA-SKPD digunakan sebagai dasar untuk menyusun rancangan APBD.

Peran DPRD sangat penting dalam proses pembahasan RAPBD yang pada intinya merupakan pembahasan RKA-SKPD baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pos pembiayaan. Pada tahap pembahasan RKA-SKPD antara DPRD dengan eksekutif inilah, peran DPRD dituntut untuk tidak sekedar berwacana dalam tataran normatif kebijakan, tetapi yang lebih penting setelah itu adalah aspek teknis ini kebijakan dapat dinilai efektifitas dan efisiensinya, serta dapat melakukan pengawasan awal melalui tindakan pencegahan pada saat pembahasan RKA-SKPD untuk mendeteksi secara lebih dini terhadap

kemungkinan terjadinya ketidakefisiensi anggaran, dan ketidakefektifan anggaran.

Anggaran daerah mempunyai peranan penting dalam sistem keuangan daerah. Peran anggaran daerah dapat dilihat berdasarkan fungsi utamanya, yaitu:

1. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan.
2. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal.
4. Anggaran sebagai alat politik.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi pemerintah daerah dan yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran.
6. Anggaran sebagai alat evaluasi kerja.
7. Anggaran sebagai alat memotivasi manajemen.
8. Anggaran sebagai alat untuk mencapai ruang publik (*public space*), dalam arti bahwa proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat.

Pendapatan adalah semua penerimaan atas rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan terdiri atas:

#### i. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah dan penerimaan lainnya.

#### ii. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan melalui peraturan daerah. Pemungutan ini dikenakan pada semua objek pajak seperti orang atau badan, benda bergerak atau tak bergerak.

#### iii. Retribusi Daerah

Retribusi yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. Retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

#### iv. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah yaitu penerimaan berupa bagian laba bersih Bank Pembangunan Daerah, perusahaan daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba bersih perusahaan daerah lainnya dan penyertaan modal daerah.

#### v. Pendapatan Lain-Lain yang Sah

Yang termasuk rincian pendapatan lain-lain yang sah antara lain: hasil penjualan barang milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, dan penerimaan jasa giro (kas daerah dan lain-lain).

#### vi. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Menurut UU no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa yang dimaksud dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan daerah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah ini terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

c. Dana bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan.

#### i. Belanja Administrasi Umum

Belanja administrasi umum (belanja tidak langsung) adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh program atau kegiatan. Jenis belanja tidak langsung ini berupa belanja pegawai atau personalia, barang dan jasa, perjalanan dinas, dan pemeliharaan. Keberadaan belanja tidak langsung bukan merupakan konsekuensi dari ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan, karena belanja ini digunakan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang bersifat umum.

#### ii. Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Belanja operasi dan pemeliharaan (belanja langsung) adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh program atau kegiatan yang direncanakan. Keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi dari adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung yaitu input (alokasi biaya) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program yang diharapkan. Dan jenis belanja tidak



langsung berupa belanja pegawai atau personalia, barang dan jasa, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

### iii. Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja langsung untuk membiayai kegiatan investasi yang akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Jenis belanja modal berupa belanja tanah, belanja peralatan, belanja gedung dan bangunan, dan belanja aset-aset lainnya.

### iv. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja langsung yang digunakan dalam pembagian hasil dan pemberian bantuan berupa uang dengan tidak mengharap imbalan. Atau dapat juga diartikan sebagai kegiatan pengalihan uang dan atau barang dari pemerintah daerah. Jenis belanja bagi hasil dan bantuan keuangan berupa bagi hasil pajak, retribusi, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan kelurahan dan organisasi kemasyarakatan.

### v. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak terduga adalah belanja langsung yang dialokasikan untuk kegiatan di luar rencana, yaitu ketika terjadi bencana alam atau bencana sosial.

## **II.2 Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan**

### **II.2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi merupakan aktivitas ekonomi suatu daerah yang kemudian akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan kemandirian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan pembangunan ekonomi suatu daerah pada periode tertentu. Angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi apabila masing-masing aspek dalam suatu daerah bekerja sama dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi, diantaranya dengan meningkatkan investasi maka secara langsung juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sumber utama peningkatan ekonomi juga berasal dari peningkatan produktivitas seluruh perekonomian. Dalam usaha mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan maka produktivitas masyarakat dan efisiensi perlu terus ditingkatkan mengingat kesulitan dalam pengelolaan sumber-sumber investasi.

Modal sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Modal tersebut harus digunakan untuk kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dalam menggerakkan perekonomian pada sektor-sektor

produktif. Seperti teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: sumber-sumber alam yang tersedia, sumber-sumber manusiawi, dan stok barang kapital. Unsur-unsur tersebut merupakan modal dasar pembangunan ekonomi, karena sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi masyarakat, penduduk sangat berperan dalam menggunakan sumber-sumber alam yang tersedia dan harus didukung oleh stok kapital yang ada.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Jadi, perkembangan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Samuelson (1995) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi adalah menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari GDP potensial atau output dari suatu negara. Ada empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, pembentukan modal, perubahan teknologi dan informasi.

Tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa antara lain:

1. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dana modal atau sumber daya manusia.

2. Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital.

3. Kemajuan.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Penekanan pada arti proses disini karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi dilihat dalam kurun waktu yang lama, misalnya 10, 20 atau 50 tahun, bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kecenderungan yang bersumber dari proses internal perekonomian itu artinya harus berasal dari kekuatan yang ada dalam perekonomian itu sendiri.

Masalah pertumbuhan dan pemerataan telah menjadi bahan perdebatan yang tidak ada habisnya. Hal ini sering dihadapkan dengan pendapat kelompok minoritas dan *mainstream* yang selalu bertabrakan. Hubungan antara kelompok minoritas dan *mainstream* sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi, karena di suatu pihak ada yang berpendapat sebaliknya. Memang tidak banyak negara yang telah berhasil memadukan antara pertumbuhan dan pemerataan, akan tetapi yang banyak adalah yang berhasil menciptakan pertumbuhan yang tinggi tetapi di ikuti dengan ketimpangan yang semakin lebar.

## II.2.2 Pengangguran

Sumber daya manusia suatu daerah mempunyai peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, karena dengan adanya jumlah sumber daya manusia yang besar dan produktif akan menjadi faktor penentu keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah. Masalah sumber daya manusia adalah ketenagakerjaan, jika suatu daerah tidak dapat mengendalikan dan mengarahkannya maka akan berakibat pada munculnya pengangguran.

Sedangkan definisi dari pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (berusia antara 15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan akan tetapi belum mendapatkan pekerjaan dan orang yang tidak sedang mencari kerja (contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa SMP dan SMA, mahasiswa/i, dan lain sebagainya) karena sesuatu hal, tidak atau belum membutuhkan pekerjaan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu (Kuncoro, 2004):

1. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
2. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

3. Pengangguran terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka ini adalah:

- Para pencari lapangan pekerjaan tidak mempunyai pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan pengguna tenaga kerja, sehingga meskipun sebenarnya tersedia lapangan pekerjaan tertentu para pencari kerja tidak dapat diterima karena tidak memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan oleh organisasi atau perusahaan yang memerlukan tenaga kerja tersebut.
- Terjadi kelesuan di bidang ekonomi sehingga berbagai perusahaan mengambil keputusan untuk tidak merekrut tenaga kerja baru, bahkan sering terjadi perusahaan menempuh cara *down siling* (pengurangan tenaga kerja yang sudah bekerja di perusahaan bersangkutan).
- Tuntutan persaingan, tuntutan para pemilik modal dan pemilik saham serta tuntutan teknologi sering berakibat menuntut pengetahuan baru, keterampilan baru, dan kemampuan berkarya yang lebih tinggi yang tidak dimiliki oleh para pencari kerja.
- Kurangnya jiwa kewirausahaan.
- Kurangnya kesempatan berusaha.

Macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu (Kuncoro, 2004):

- a. Pengangguran konjungtural (*Cycle Unemployment*) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik-turunnya) kehidupan perekonomian atau siklus ekonomi.
- b. Pengangguran struktural (*Struktural Unemployment*) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti:
  - Akibat permintaan berkurang.
  - Akibat kemajuan dan penggunaan teknologi.
  - Akibat kebijakan pemerintah.
- c. Pengangguran friksional (*Frictional Unemployment*) adalah pengangguran yang muncul akibat ketidaksesuaian antar pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela.
- d. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian musim. Misalnya pada saat pergantian musim tanam ke musim panen.

- e. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin.
- f. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (*aggregat demand*).

Apabila tingkat pengangguran suatu daerah relatif tinggi, maka hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian. Sedangkan dampak ekonomis dari pengangguran adalah hilangnya kesempatan kerja yang seharusnya diperoleh sehingga pendapatan menurun. Dan dampak dari penurunan kesempatan kerja dan pendapatan kerja akan berakibat pada meluasnya penurunan kualitas pendidikan, dan tingginya angka pengangguran menjadi salah satu faktor utama rendahnya taraf hidup penduduk suatu daerah.

### **II.2.3 Indeks Pembangunan Manusia**

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil di capai adalah dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua pertiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga).

3. Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Pengukuran alternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan.

- i. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode *Trussel* dengan metode *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia). Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

## ii. Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dari angka melek huruf diberi bobot dua per tiga.

Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (nol). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dari nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas.

## iii. Standar Hidup Layak

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak

menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

#### **II.2.4 Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Pengertian kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Sedangkan dari segi ekonomi yang dimaksud dengan kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar, sedangkan jika dari segi sosial kemiskinan berarti ketidakmampuan dalam peran sosial (BPS dan DepSos, 2002).

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.

- Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.
- Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.

Kemiskinan menurut Dinas Sosial Jateng dan DIY didefinisikan dari dua sisi, yaitu sisi ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi yang berarti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar, sedangkan dari sisi sosial yang berarti ketidakmampuan dalam peran sosial.

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, baik yang relatif tetap maupun yang berkembang. Faktor relatif tetap misalnya letak geografis dan daya dukung alam. Faktor yang berkembang berupa keadaan sosial budaya yang menyangkut pengetahuan dan ketrampilan, adat istiadat, situasi politik dan kebijaksanaan penguasa. Ada beberapa indikator yang menyebabkan orang terperangkap kemiskinan, diantaranya perkembangan di bidang sosial dan ekonomi antara lain pelayanan kesehatan, gizi, pengajaran, perumahan, konsumsi, transportasi dan jasa, pertanian, industri dan perdagangan.

## **II.3 Keterkaitan Antara Kinerja Keuangan Dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan.**

### **II.3.1 Hubungan Kinerja Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Walaupun begitu, tidak semua pihak-pihak tersebut dapat memahami laporan keuangan dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis laporan keuangan sebagai alat bantu untuk memahami, menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasinya, dan bagaimana menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Ada beberapa macam alat analisis laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Diantaranya adalah rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, SiLPA, pertumbuhan PAD dan pertumbuhan APBD. Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kurang atau tidak adanya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah tersebut. Di samping itu, aparaturnya dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah.

Semakin mandiri suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah tidak tergantung lagi dari dana bantuan pusat maupun pinjaman-pinjaman (dana perimbangan) dikarenakan telah mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar. Dengan semakin mandiri suatu daerah, daerah tersebut mempunyai wewenang untuk menggunakan dana yang didapatkan untuk kemajuan daerahnya. Dalam hal ini untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

*H<sub>1</sub>: Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.*

Pengefektifan penerimaan daerah dimaksudkan agar jumlah target penerimaan yang dianggarkan bisa dicapai atau terealisasi. Jadi target penerimaan yang telah dianggarkan menjadi acuan dalam usaha mendapatkan penerimaan daerah. Jumlah penerimaan yang terealisasi dengan target penerimaannya menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan. Karena penerimaan daerah tersebut akan digunakan pemerintah daerah dalam mendanai program-programnya, dan tentunya program yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

Dari perspektif manajemen pemerintah negara modern, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum

(Barzelay, 1991 dalam Hadi Sasana 2006). Kesejahteraan umum yang dimaksudkan adalah pertumbuhan ekonomi.

*H<sub>2</sub>: Kinerja keuangan berupa rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.*

Efisiensi kinerja dapat diukur dengan membandingkan jumlah penerimaan dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Artinya seberapa efisien pemerintah daerah membelanjakan penerimaan yang telah didapatkan. Karena dana setiap pengeluaran daerah berupa biaya-biaya tersebut memakai dana dari penerimaan. Jika pemerintah daerah tidak bijak dalam menyusun pengeluaran, maka akan terjadi defisit anggaran. Sehingga dari itu akan dilakukan pengurangan program-program kerja, dan imbasnya program kerja yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi akan ikut dikurangi.

Selaras dengan misi dari otonomi daerah yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan juga meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat (Barzelay, 1991 dalam Hadi Sasana, 2006), maka faktor efisiensi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan umum berupa pertumbuhan ekonomi.

*H<sub>3</sub>: Kinerja keuangan berupa rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.*

SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dengan realisasi pengeluaran. Jika pada sebelumnya dijelaskan jika penerimaan



daerah lebih kecil daripada pengeluaran daerah maka akan terjadi defisit, dan imbasnya terjadi pengurangan anggaran, maka pada SiLPA terjadi surplus dari realisasi penerimaan terhadap realisasi pengeluaran. Struktur APBD baru yang berbasis kinerja memungkinkan terdapat SiLPA pada akhir tahun anggarannya, dan dana sisa anggaran tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk sumber pembiayaan penerimaan tahun anggaran berikutnya (Mahmudi, 2007 : 160). Dan sangat dimungkinkan jika surplus itu besar maka pemerintah daerah akan menggunakannya untuk membuat program baru, khususnya program yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya.

*H<sub>4</sub>: Kinerja keuangan berupa SiLPA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.*

Pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari nilai PDRB menunjukkan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Disini peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung peningkatan jumlah barang yang dihasilkan melalui peraturan-peraturan yang dibuatnya dan alokasi dana. Bagaimana memanfaatkan asetnya untuk digunakan dalam meningkatkan produk yang dihasilkan. Menjaminkannya untuk tambahan modal, dan lain-lain.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pendapatan asli daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain lebih fluktuatif dan cenderung di luar kontrol atau kewenangan pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas, 2003).

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Dari gambaran ini seharusnya pemerintah daerah harus lebih konsentrasi pada pemberdayaan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait pajak dan retribusi.

Sektor-sektor industri, khususnya jasa perlu dioptimalkan. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan nilai tambah dari lebih optimalnya sektor industri ini (Kadjatmiko dan Mahi dalam Sidik, 2002). Dengan kata lain,

pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi beberapa PAD (pajak dan retribusi) yang akan diterima.

Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB. Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan Bappenas (2003) pada pemerintah provinsi menunjukkan ada 12 provinsi (41,37%) yang mempunyai elastisitas  $> 1$  (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Sedangkan provinsi yang lain PDRBnya tidak cukup mempengaruhi perubahan PAD. Patut diduga adanya kenaikan nilai tambah PDRB lebih banyak, keluar dari daerah tersebut.

Dalam era desentralisasi fiskal, hal ini wajar terjadi, mengingat adanya kompetisi antar pemerintahan dalam memfasilitasi berbagai sektor guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Lin dan Liu, 2002; Saragih, 2003; Bappenas, 2003)

*H<sub>5</sub>: Kinerja keuangan berupa Pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi*

Berdasarkan teori Keynes, APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah

diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan. Di bidang pengelolaan pendapatan daerah, akan terus diarahkan pada peningkatan PAD. Untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun menggali sumber-sumber baru. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah beberapa hal penting yang perlu dilakukan antara lain dengan memperbaharui data obyek pajak, peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, peningkatan pengawasan internal terhadap petugas pajak, dan mencari sumber-sumber pendapatan lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pada sisi belanja, kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dengan mengupayakan peningkatan porsi belanja pembangunan dan melakukan efisiensi pada belanja aparatur. Dalam kaitannya dengan pembiayaan, akan terus diupayakan peningkatan penyertaan modal pada beberapa badan usaha milik daerah agar dapat menghasilkan peningkatan PAD. Selanjutnya disiplin dan efisiensi anggaran akan secara konsisten dipertahankan dan dilaksanakan guna

meningkatkan SiLPA tanpa mempengaruhi penurunan kinerja SKPD. Bersamaan dengan itu, kebijakan pembiayaan defisit akan diarahkan penanggulangannya melalui sumber selain pinjaman daerah, mengingat masih terbatasnya sumber pendapatan asli daerah dan belum dinamisnya sektor industri maupun jasa sebagai basis penerimaan daerah.

*H6: Kinerja keuangan berupa Pertumbuhan APBD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi*

### **II.3.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan.**

Pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan dan mempengaruhi indeks pembangunan manusia pada daerah tersebut. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjangnya adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.

Gambaran secara menyeluruh dari kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dengan mengukur dengan tingkat pertumbuhan ekonominya yang kita kenal dengan konsep Produk Domestik Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makro ekonomi. Dalam konsep penghitungan PDRB, yang dihitung adalah nilai bruto dari seluruh barang

dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam wilayah yang diukur. Salah satu aspek untuk melihat kinerja perekonomian adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan pekerjaan merupakan *concern* dari pembuat kebijakan.

Angkatan kerja merupakan jumlah total dari pekerja dan pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang menganggur. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi.

Hukum Okun menyatakan bahwa laju pengangguran berbanding terbalik dengan selisih laju pertumbuhan ekonomi dalam kondisi normal. Ini berarti jika laju pertumbuhan meningkat maka tingkat pengangguran menurun begitu pun sebaliknya. Penelitian Arthur Okun dalam Putong (2003) mengatakan apabila GNP (*Gross National Product*) tumbuh sebesar 2,5% diatas trendnya yang telah dicapai pada tahun tertentu, maka tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%. Jadi  $1\% / 2,5\% = 0,4\%$ . Apabila tingkat pengangguran ingin diturunkan sebesar 2 %, maka pertumbuhan ekonomi haruslah dipacu agar bisa tumbuh sebesar 5% diatas rata-rata.

*H<sub>7</sub>: Pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan negatif terhadap pengangguran.*

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (*enlarging the choices of the people*). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Di tengah eskalasi persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi. Jika tidak demikian maka bangsa tersebut akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju.

Data IPM menjadi sangat penting dan bernilai strategis serta dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah adalah penentuan dana perimbangan wilayah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang menggunakan data IPM. Selain

itu IPM juga digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah. Perkembangan IPM menunjukkan peningkatan capaian IPM seiring dengan membaiknya perekonomian negara.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP, 1966) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia bersifat timbal balik dan mempunyai hubungan yang positif.. Artinya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia dan sebaliknya. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan.

*H<sub>8</sub>: Pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan positif terhadap indeks pembangunan manusia.*

Dibanyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi



biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maka diharapkan angka kemiskinan di daerah tersebut akan menurun.

Pertumbuhan tersebut harus efektif mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung pertumbuhan ekonomi perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor di mana orang miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Dan secara tidak langsung diperlukan pemerintah yang cukup efektif untuk mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang boleh jadi di dapatkan dari sektor moderen seperti jasa dan manufaktur yang padat modal ke golongan penduduk miskin.

Seperti sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang di ukur melalui PDRB menunjukkan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Maksudnya adalah dengan meningkatnya jumlah produk yang dihasilkan suatu daerah menunjukkan bahwa penduduk memiliki penghasilan yang meningkat juga.

*H<sub>9</sub>: Pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan negatif terhadap kemiskinan.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **III.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan berupa Statistika deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut.

#### **III.2 Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sampel dari penelitian adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2006-2008 terdiri dari 10 Kabupaten dan 4 kota.

Kualifikasi yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyertakan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2006 – 2008.

- 3) Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan 2000 menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2006 – 2008.

### **III.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data target dan realisasi keuangan APBD dan PAD, data pertumbuhan ekonomi, data pengangguran, data indeks pembangunan manusia dan data kemiskinan. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Provinsi Sumatera Selatan, BPS Provinsi Yogyakarta serta situs-situs internet Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, Bank Indonesia, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan.

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan literatur yang meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta buku-buku tentang keuangan daerah dan otonomi daerah.

2. Studi Lapangan

a. Observasi

Mengadakan tinjauan terhadap objek penelitian dengan cara mengamati, meneliti dan mempelajari tentang data-data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber.

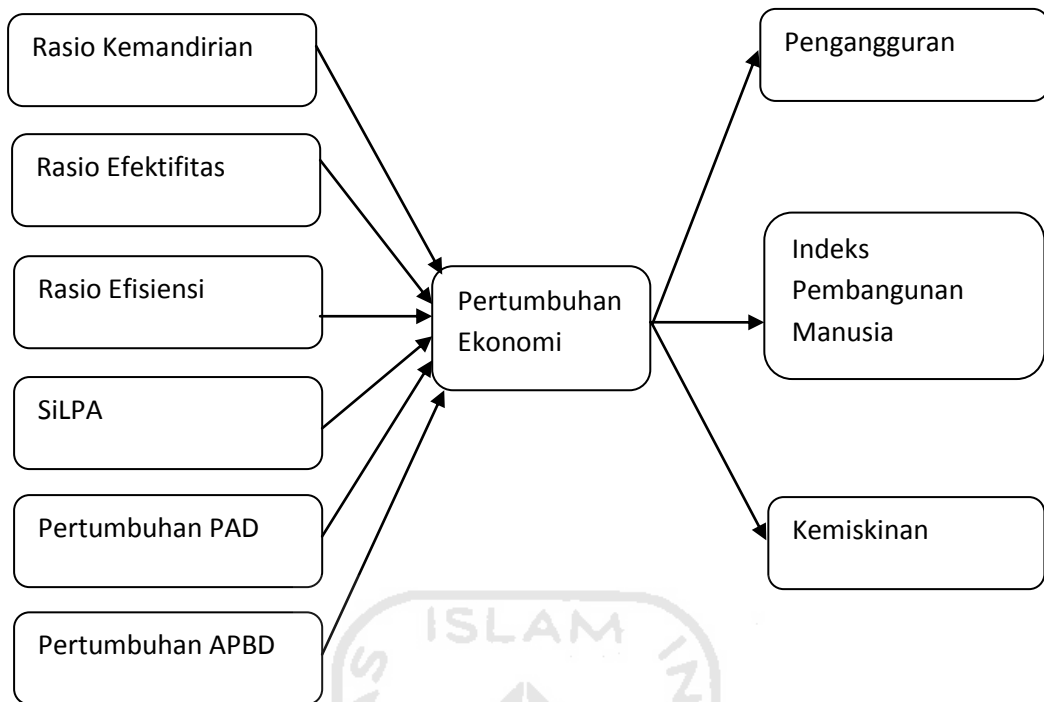
b. Dokumentasi

Pencatatan, pengumpulan dan pengelompokkan data berkaitan dengan permasalahan penelitian dari sumber data sekunder.

#### III.4 Desain Penelitian

Mengingat model dalam penelitian ini adalah model kausalitas (hubungan/pengaruh sebab akibat), maka untuk menguji hipotesis yang diajukan digunakan alat uji Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model* – SEM) dan analisis komponen utama (*Principle Components Analysis*). Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model* - SEM) merupakan suatu teknik statistik yang dipakai untuk menguji serangkaian hubungan antara beberapa variabel yang terbentuk dari variabel faktor ataupun variabel terobservasi yang dianalisis dengan menggunakan program AMOS.

Secara skematis, desain penelitian untuk menggambarkan alur permasalahan dan jawaban yang diharapkan serta model pengujiannya dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Desain Penelitian**

### III.5 Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, SiLPA, pertumbuhan PAD dan pertumbuhan APBD. Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Rasio efektifitas diukur dengan:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Rasio efisiensi diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

SiLPA adalah sisa lebih pembiayaan anggaran. Ini menggambarkan selisih lebih antara realisasi penerimaan daerah dengan realisasi pembiayaan daerah. SiLPA akan menjadi alternatif pertama yang akan digunakan pemerintah daerah apabila terjadi defisit anggaran. Sehingga semakin besar SiLPA maka semakin baik.

$$\text{SiLPA} = \text{Realisasi Penerimaan} - \text{Realisasi Pengeluaran}$$

Untuk pertumbuhan PAD diukur dari pendapatan asli daerah saat ini ( $\text{PAD}_t$ ) dikurangi dengan pendapatan asli daerah sebelumnya

( $PAD_{t-1}$ ) dibagi dengan pendapatan asli daerah sebelumnya ( $PAD_{t-1}$ ) dan dinyatakan dalam bentuk persen.

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Untuk pertumbuhan APBD diukur dari total anggaran pendapatan belanja daerah saat ini ( $\sum APBD_t$ ) dikurangi dengan total anggaran pendapatan belanja daerah sebelumnya ( $\sum APBD_{t-1}$ ) dibagi dengan total anggaran pendapatan belanja daerah sebelumnya ( $\sum APBD_{t-1}$ ) dan dinyatakan dalam bentuk persen.

$$\text{Pertumbuhan APBD} = \frac{\sum APBD_t - \sum APBD_{t-1}}{\sum APBD_{t-1}} \times 100\%$$

Untuk pertumbuhan ekonomi diukur dengan pendapatan domestik regional bruto ( $PDRB_t$ ) dikurangi dengan pendapatan domestik regional bruto sebelumnya ( $PDRB_{t-1}$ ) dibagi dengan pendapatan domestik regional bruto sebelumnya ( $PDRB_{t-1}$ ).

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

Untuk pengangguran diukur dengan tingkat pengangguran yang ada di daerah tersebut. Yaitu dengan membandingkan jumlah penduduk yang tidak bekerja/mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam bentuk persen.

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Penduduk yang Tidak Bekerja}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Untuk Indeks Pembangunan Manusia pengukurannya diukur dalam bentuk persen dan hasil persennya sudah tersedia di Badan Pusat Statistik.

Sedangkan tingkat kemiskinan diukur dengan membandingkan jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dan dinyatakan dalam bentuk persen.

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk keseluruhan}} \times 100\%$$

### III.6 Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel eksogen dan endogen. Variabel kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, SiLPA, pertumbuhan PAD dan pertumbuhan APBD adalah variabel eksogen. Variabel pertumbuhan



ekonomi adalah variabel eksogen dan variabel endogen, sedangkan variabel kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan pengangguran adalah variabel endogen.

### **III.7 Teknik Analisis**

Semua data dikumpulkan secara sistematis dan disajikan secara informatif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah secara komperhensif dan bersifat deskriptif-analitik. Analisis yang berkaitan dengan penjelasan berbagai perilaku variabel dilakukan dengan analisis deskriptif berdasarkan pada berbagai teori pendekatan yang relevan. Analisis keterkaitan antara berbagai variabel dilakukan dengan pendekatan uji statistik berupa Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model – SEM*).

Pendekatan SEM merupakan sekumpulan teknik-teknik statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif kompleks secara simultan. Hubungan yang kompleks tersebut dibangun

antara satu atau lebih variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada, sesuai dengan model penelitian pada gambar 3.1. Kemudian dilakukan berbagai uji *fit index* untuk mengukur derajat kesesuaian antara model dengan data yang diperoleh. Uji tersebut adalah:

1. Uji *Chi-square statistic* ( $X^2$ ) untuk mengukur overall fit. Nilai chi-square yang tinggi relatif terhadap *degree of freedom* menunjukkan bahwa matrik kovarian atau korelasi yang di observasi dengan yang di prediksi berbeda secara nyata dan ini menghasilkan probabilitas (p) lebih kecil dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ), dan sebaliknya.
2. *Root Mean Square Error of Approximation* (RMSEA) untuk mengkompensasi *Chi-square statistic* dalam sampel besar. Nilai RMSEA antara 0,05 sampai 0,08 merupakan ukuran yang dapat diterima.

3. *The minimum sample discrepancy function* (CMIN) dibagi dengan *degree of freedomnya* akan menghasilkan indeks CMIN/DF. Dalam hal ini CMIN/DF tidak lain adalah statistik chisquare,  $X^2$  dibagi DF-nya sehingga disebut  $X^2$  relatif. Nilai  $X^2$  relatif kurang dari 2.0 atau bahkan kadang kurang dari 3.0 adalah indikasi dari *accpetable fit* antara model dan data.

4. *Tucker Lewis Index* (TLI) untuk mengukur kelebihan suatu model dengan model yang lain. Nilai TLI yang direkomendasikan adalah sama atau  $> 0.09$ .

5. *Comparative Fit Index* (CFI) memiliki keunggulan tidak bisa dipengaruhi oleh ukuran sampel. Nila CFI yang direkomendasikan agar dapat diterima adalah  $> 0,90$ .

## BAB IV

### ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai apakah kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, SiLPA, pertumbuhan PAD, dan pertumbuhan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi, serta apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan pengangguran, dilakukan analisis data dengan program AMOS. 6. Sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu dijelaskan tentang gambaran/deskriptif tentang data-data penelitian.

#### IV.1 Analisis Deskriptif

Berikut akan dijelaskan statistik deskriptif yaitu menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi (PDRB), indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan pengangguran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1. Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian	42	1.50	11.82	4.1253	2.34322
Efektifitas	42	56.69	108.86	95.4213	10.61165
Efisiensi	42	70.26	117.70	99.2501	9.36616
SiLPA	42	-84.976.377,00	171.477.820,00	4.588.409,26	53.680.431,62
P_PAD	42	-42.36	70.91	11.7583	21.40353
P_APBDD	42	-17.65	41.21	16.2815	12.74401
PE	42	2.72	8.71	5.3905	1.20080
Pengangguran	42	2.58	19.43	8.4567	4.68254
IPM	42	65.65	75.49	69.8907	2.17118
Kemiskinan	42	7.57	35.52	19.1369	7.17361

Sumber : Data Sekunder diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan nilai rata-rata rasio kemandirian adalah sebesar 4,1253% dan standar deviasi sebesar 2,343%. Hal ini berarti rata-rata kemandirian pendapatan daerah yang berasal dari PAD rata-rata adalah 4,1253% dari bantuan pemerintah pusat. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai seluruh anggaran belanjanya.

Deskriptif terhadap rasio efektifitas yaitu perbandingan antara penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target PAD memiliki rata-rata sebesar 95,4213% dan standar deviasi sebesar 10,611%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan belum efektif karena belum mampu menghasilkan PAD sesuai dengan yang ditargetkan sebelumnya, bahkan lebih rendah daripada nilai target PAD.

Deskriptif terhadap rasio efisiensi memiliki rata-rata sebesar 99,2501% dan standar deviasi sebesar 9,366%. Hal ini berarti besarnya pengeluaran dengan penerimaan hampir berimbang yaitu rata-rata sebesar 99,25% yang menunjukkan bahwa pengeluaran hampir sama dengan penerimaan.

Hasil deskriptif terhadap tingkat serapan anggaran yang diukur dengan SiLPA yaitu selisih antara penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran rata-rata adalah sebesar (dalam ribuan rupiah) Rp. 4.588.409,26 dan standar deviasi sebesar (dalam ribuan rupiah) Rp. 53,680.431,62. Hal ini berarti pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki selisih pengeluaran, dibandingkan dengan besarnya penerimaan daerah serta

pembiayaan bersih yang cukup besar, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan untuk APBD tahun berikutnya.

Hasil deskriptif terhadap pertumbuhan PAD menunjukkan bahwa rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki pertumbuhan yang positif dengan besarnya rata-rata pertumbuhan adalah sebesar 11,75% per tahun dengan standar deviasi sebesar 21,40%. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan APBD yang lebih tinggi lagi yaitu sebesar 16,28% per tahun dengan standar deviasi sebesar 12,74%.

Deskriptif terhadap laju PDRB yaitu pertumbuhan ekonomi memiliki rata-rata sebesar 5,3905% dan standar deviasi sebesar 1,20%. Hasil ini berarti rata-rata pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan cenderung mengalami peningkatan PDRBnya yang ditunjukkan dengan laju PDRB positif.

Hasil deskriptif pada tingkat pengangguran menunjukkan nilai rata-rata sebesar 8,46% dan standar deviasi sebesar 4,69%. Hal ini berarti rata-rata penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang tidak bekerja adalah sebesar 8,46% dari seluruh penduduk yang berusia diatas 15 tahun, sedangkan sisanya bekerja di sektor informal maupun di sektor formal.

Hasil deskriptif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 69,89% dan standar deviasi sebesar 2,171%. Hal ini berarti rata-rata indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam kriteria yang cukup

atau menengah karena berada pada interval 50% – 79,9%. Artinya rata-rata setiap orang memiliki penghasilan yang lebih cukup karena pendidikannya lebih cukup tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang.

Deskriptif terhadap kemiskinan yaitu memiliki rata-rata sebesar 19,1369% dan standar deviasi sebesar 7,17%. Hasil ini berarti tingkat kemiskinan rata-rata di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 19,1369%

## **IV.2 Analisis Statistik**

Pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik AMOS6.0. sebelum dilakukan analisis AMOS 6.0 terlebih dahulu dilakukan uji kecocokan model (*Goodness of Fit*).

### **IV.2.1 Uji Kebaikan Model**

Untuk mengetahui kriteria model yang baik (*Goodness of Fit*) digunakan Uji *Chi Square*, *Root Mean Square Error of Approximation*, *Goodness of Fit Index*, *Adjusted Goodness of Fit Index* dan *Tucker Lewis Index*. Uji kebaikan model ini menggunakan *software* AMOS versi 6.0. Berikut ini *Goodness of Fit Index* yang dihasilkan setelah pengujian:

**Tabel 4.2*****Goodness of Fit Index***

<b><i>Goodness of Fit Index</i></b>	<b>Hasil</b>	<b><i>Cut Off Value</i></b>	<b><i>Keterangan</i></b>
Chi Square	48,985	Diharapkan kecil	
Probability	0,001	$\geq 0,05$	Kurang
RMSEA	0,079	$\leq 0,08$	Fit
GFI	0,910	$\geq 0,90$	Fit
CFI	0,920	$\geq 0,90$	Fit
TLI	0,909	$\geq 0,90$	Fit

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2012

Nilai  $X^2$  – *Chi Square* dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  yang menyatakan tidak terdapat perbedaan antara matriks kovarians sampel dengan matriks kovarians populasi yang diestimasi tidak dapat diterima. Artinya matriks kovarians sampel dengan matriks kovarians populasi yang diestimasi adalah tidak sama, sehingga model dinyatakan kurang fit. Akan tetapi, tidak menjadi masalah karena menurut hasil pengujian yang lain telah memenuhi kriteria model.

*The Root Mean Square Error of Approximation* – RMSEA, indeks yang digunakan untuk mengkompensasi *Chi Square* Statistik dalam sampel yang besar. Nilai RMSEA menunjukkan *Goodnes of Fit* yang dapat diharapkan bila model diestimasi dalam populasi. Nilai penerimaan yang direkomendasikan  $\leq 0,08$ , sementara hasil pengujian pada model adalah sebesar  $0,079 < 0,08$  sehingga modelnya adalah baik.

Berdasarkan analisis terhadap *Goodnes of Fit* – GFI mencerminkan tingkat kesesuaian model secara keseluruhan. Tingkat penerimaan yang



direkomendasikan  $GFI > 0,90$ . Hasil menunjukkan nilai  $GFI$  sebesar  $0,910 > 0,9$ , sehingga model memiliki fit yang baik.

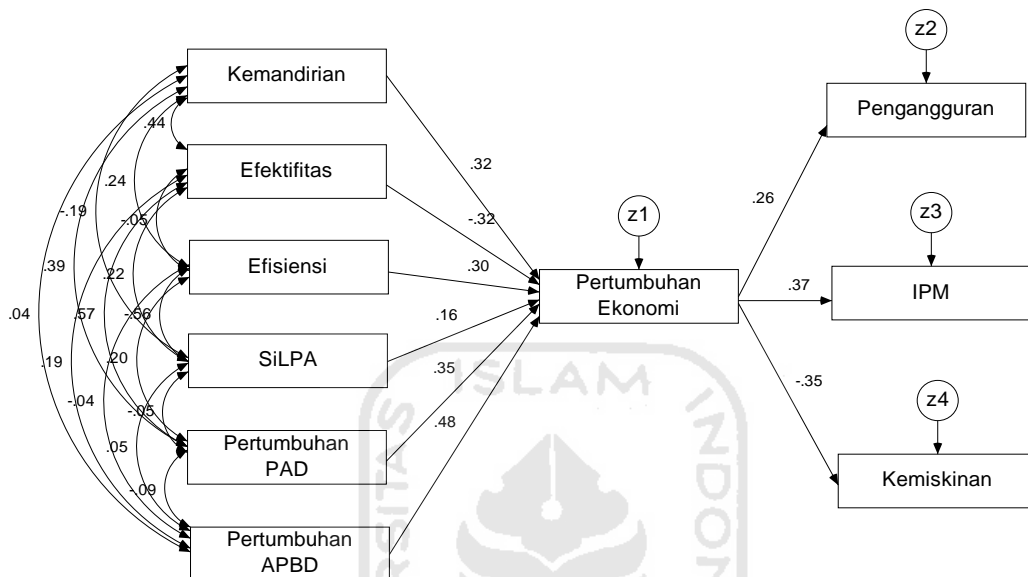
Indek  $CFI$  (*Comparative Fit Index*) memiliki keunggulan tidak bisa dipengaruhi oleh ukuran sampel karena itu sangat baik untuk mengukur tingkat penerimaan sebuah model (Hulland, et al., 1996; Tanaka, 1993 dalam Ferdinand, 2005:60). Nilai  $CFI$  yang direkomendasikan agar dapat diterima adalah  $> 0,9$ . Hasil penelitian menunjukkan nilai  $CFI$  sebesar  $0,920$  yang nilainya lebih besar dari  $0,9$ , sehingga menunjukkan bahwa model ini memiliki fit yang diterima.

*Tucker Lewis Index* –  $TLI$  merupakan alternatif *Incremental Fit Index* yang membandingkan model yang diuji dengan *baseline*. Nilai yang direkomendasikan sebagai tingkat kesesuaian yang baik adalah  $\geq 0,90$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai  $TLI$  sebesar  $0,909$  sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat kesesuaian berada pada kriteria baik

Menurut Ghazali (2005: 42) menyatakan bahwa jika satu parameter yang dihasilkan tidak mampu menjelaskan tentang kesesuaian model, maka dapat diukur dengan model fit yang lain. Dari analisis kesesuaian model tersebut menunjukkan bahwa hanya ditinjau dari nilai *Chi Square* yang menyatakan model jalur yang digunakan tidak baik (tidak fit). Sedangkan dari hasil pengujian yang lain yang ditinjau dari nilai  $GFI$ ,  $CFI$ ,  $RMSEA$ , dan  $TLI$ , yang menunjukkan model yang baik. Dengan mengacu pada pendapat yang dikemukakan Ghazali, maka model jalur yang diajukan dalam penelitian ini sudah memenuhi asumsi *Goodness of Fit* (model fit yang baik).

## IV.2.2 Pengujian Struktur Model

Pengujian hipotesis dengan Analisis SEM diperoleh hasil jalur sebagai berikut:



Gambar 4.1. Hasil Diagram Jalur Output AMOS

Pengujian model dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja keuangan yang berupa rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, SiLPA, pertumbuhan PAD, pertumbuhan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran, indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan guna menjawab hipotesis penelitian. Berikut adalah hasil pengujian model:

**Tabel 4.3**

**Estimasi Hasil Analisis SEM**

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PE	<---	Kemandirian	.316	.071	2.298	.022	
PE	<---	Efektifitas	-.319	.019	-1.939	.053	
PE	<---	Efisiensi	.295	.018	2.053	.040	
PE	<---	SiLPA	.163	.000	1.108	.268	
PE	<---	P_PAD	.347	.008	2.297	.022	
PE	<---	P APBD	.484	.011	3.996	***	
Pengangguran	<---	PE	.261	.588	1.732	.083	
IPM	<---	PE	.366	.263	2.517	.012	
Kemiskinan	<---	PE	-.347	.875	-2.371	.018	

Sumber: Output AMOS 6.0

### IV.3 Pengaruh Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis alternatif pertama bahwa “*Rasio Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi*”. Hasil pengujian dengan Analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,316 dengan nilai p-value ( $0,022 < 0,05$ ). Hal ini berarti rasio kemandirian berpengaruh secara langsung dan signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini **dapat didukung**. Jika dilihat dari nilai bobot pengaruh langsung (*standardized*) yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin besar rasio kemandirian pada keuangan daerah maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardi Hamzah (2007) yang menemukan bukti empiris bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, berarti sumber pendapatan internal yang berasal dari PAD semakin kuat maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Kemandirian dan pengelolaan secara ekonomis, efektif, dan efisiensi suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan sumber pendapatan asli daerah yang semakin besar, menunjukkan bahwa daerah tersebut telah memiliki kemampuan dalam mengelola potensi daerah yang ada, sehingga ketergantungan dengan pemerintah pusat semakin rendah, dan hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonominya.

#### IV.4 Pengaruh Efektifitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Hipotesis alternatif kedua menyatakan “*Rasio Efektifitas berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi*”. Hasil pengujian dengan Analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi rasio efektifitas terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar -0,319 dengan nilai p-value ( $0,053 > 0,05$ ). Hal ini berarti rasio efektifitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini **ditolak**. Ini dikarenakan pemerintah daerah belum berusaha secara maksimal untuk mencapai target penerimaan PAD yang telah dianggarkan. Berdasarkan data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata PAD yang direalisasikan baru 95,42% dari PAD yang ditargetkan oleh

pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga target tidak tercapai dan mengakibatkan penerimaan PAD yang didapatkan tidak maksimal. Seperti yang kita ketahui, PAD tersebut digunakan untuk mendanai program-program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan pemerintah daerah di Sumatera Selatan kurang berusaha untuk mencapai target penerimaannya. Salah satunya adalah para pegawainya memiliki pekerjaan yang lain sehingga kurang maksimal dalam pekerjaan utama sebagai pegawai pemerintah.

#### IV.5 Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis alternatif ketiga bahwa “*Rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi*”. Hasil pengujian dengan Analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,295 dengan nilai p-value ( $0,040 < 0,05$ ). Hal ini berarti rasio efisiensi berpengaruh secara langsung dan signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini **dapat didukung**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Barzeley, (1991) dalam Hadi Sasana (2006) yang menyatakan bahwa faktor efisiensi berpengaruh terhadap kesejahteraan umum berupa pertumbuhan ekonomi. Untuk rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan pada level 0,05 terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan realisasi belanja yang dikeluarkan lebih kecil daripada realisasi pendapatan yang diterima atau adanya efisiensi.

Dengan adanya efisiensi, maka kelebihan atau surplus dialokasikan pada belanja lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan efisiensi PAD rata-rata adalah sebesar 99,25% dibawah 100%. Sesuai dengan pendapat Mahmudi (2007) yang menyatakan bahwa anggaran pemerintah efisien jika rasionya kurang dari 100 dan sebaliknya.

#### **IV.6 Pengaruh SiLPA terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa “*Rasio SiLPA berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi*”. Hasil pengujian dengan Analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi SiLPA terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,163 dengan nilai p-value ( $0,268 > 0,05$ ). Hal ini berarti SiLPA tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis keempat dalam penelitian ini **tidak dapat didukung**.

Hal ini disebabkan karena besarnya SiLPA di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan masih relatif kecil, jauh lebih kecil dari total penerimaan, sehingga besarnya SiLPA ini hanya memberikan kontribusi yang kecil terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **IV.7 Pengaruh Pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis alternatif kelima

bahwa “*Pertumbuhan PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi*”. Hasil pengujian dengan Analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,347 dengan nilai p-value ( $0,022 < 0,05$ ). Hal ini berarti pertumbuhan PAD berpengaruh secara signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis kelima dalam penelitian ini **dapat didukung**.

Menurut Saragih (2003) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD). Dari gambaran ini seharusnya pemerintah daerah harus lebih konsentrasi pada pemberdayaan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait pajak dan retribusi.

Pertumbuhan PAD cukup sensitif terhadap kenaikan PDRB. Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan Bappenas (2003) pada pemerintah provinsi menunjukkan ada 12 provinsi (41,37%) yang mempunyai elastisitas  $> 1$  (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PAD.

#### **IV.8 Pengaruh Pertumbuhan APBD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Pada bab sebelumnya telah dikemukakan hipotesis alternatif keenam

bahwa “*Pertumbuhan APBD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi*”. Hasil pengujian dengan Analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi pertumbuhan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,484 dengan nilai p-value ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini berarti pertumbuhan APBD berpengaruh secara signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesis keenam dalam penelitian ini **dapat didukung**.

Menurut teori Keynes, APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Kebijakan pengelolaan APBD difokuskan pada optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja dan pembiayaan bagi tercapainya sasaran atas agenda-agenda pembangunan tahunan.

Pertumbuhan APBD yang tinggi tentunya, sebagai modal awal untuk melakukan pembangunan daerah. Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah sedangkan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut harus memperlihatkan antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang ada, potensi SDA dan manusia, dan infrastruktur yang tersedia dengan pertimbangan aspek-aspek tersebut selanjutnya disusun perencanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



#### **IV.9 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran**

Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini menyatakan bahwa “*Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran*”. Hasil pengujian dengan Analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran adalah sebesar 0,261 dengan nilai p-value ( $0,083 > 0,05$ ). Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian hipotesis ketujuh dalam penelitian ini **tidak dapat didukung**.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Iwan Darmawan (2010) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap jumlah pengangguran. Perbedaan hasil ini terjadi lebih dikarenakan lokasi tempat penelitian diambil. Pada penelitian Iwan mengambil lokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Dimana lapangan pekerjaan di sana secara keseluruhan masih terdapat banyak peluang. Sehingga walaupun terjadi pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, tingkat penganggurannya cenderung tetap, bahkan meningkat. Karena angkatan kerja bertambah, tetapi tenaga kerjanya tidak banyak terserap.

#### **IV.10 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan**

##### **Manusia**

Hipotesis kedelapan dalam penelitian ini menyatakan bahwa “*Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan*”.

*manusia*". Hasil pengujian dengan Analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi pertumbuhan ekonomi terhadap IPM adalah sebesar 0,366 dengan nilai p-value ( $0,012 < 0,05$ ). Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian hipotesis kedelapan dalam penelitian ini **dapat didukung**. Jika dilihat dari nilai bobot pengaruh langsung (*standardized*) yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Selatan semakin meningkat.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP, 1966) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia bersifat timbal balik. Artinya, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia dan sebaliknya. Di satu sisi pembangunan manusia yang berkelanjutan perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang memadai, dan sisi lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga perlu didukung oleh pembangunan manusia (SDM) yang memadai pula.

Ketika tingkat pendapatan atau PDB per kapita rendah akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun. Begitu juga sebaliknya, tingkat pendapatan yang relatif tinggi cenderung meningkatkan belanja rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ranis (2004), bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi

belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan menurut Sen (1999) memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kapabilitas penduduk. Banyak studi menyebutkan, peningkatan pendapatan mendorong peningkatan kesehatan dan pendidikan. Studi di Brazil, Chile dan Nikaragua menunjukkan, bahwa peningkatan pendapatan berpengaruh terhadap peningkatan beberapa indikator tingkat kesehatan, seperti rasio usia dengan tinggi badan serta angka harapan hidup ketika lahir (UNDP, 1996; 68-69). Studi-studi lain juga menyebutkan, peningkatan pendapatan mempengaruhi tingkat pendidikan. Angka perkiraan di Brazil menyebutkan, bahwa 10% peningkatan pendapatan mempengaruhi 5% – 8% peningkatan pendidikan. Begitu juga di Pakistan, terdapat hubungan yang erat antara peningkatan pendapatan dengan rata-rata tahun pendidikan yang dapat diselesaikan. Studi Lee (1996) di Korea juga menghasilkan pengaruh yang signifikan tingkat pendapatan dan beberapa variabel lainnya terhadap rata-rata tahun sekolah (*years of schooling*) penduduk.

#### **IV.11 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan**

Hipotesis kesembilan dalam penelitian ini menyatakan bahwa *“Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan”*. Hasil pengujian dengan Analisis Jalur (SEM) dapat diketahui bobot koefisien regresi terstandarisasi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan adalah sebesar -0,347 dengan nilai p-value ( $0,018 < 0,05$ ). Hal ini berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian hipotesis ketujuh dalam penelitian ini **dapat didukung**. Jika dilihat dari nilai bobot pengaruh langsung (*standardized*) yang bernilai negatif menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka jumlah kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan akan berkurang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ardi Hamzah (2007) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2007). Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2007).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

- 1) Terdapat pengaruh secara positif dan signifikan rasio kemandirian daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 2) Tidak terdapat pengaruh secara positif dan signifikan rasio efektifitas terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 3) Terdapat pengaruh positif secara signifikan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 4) Tidak terdapat pengaruh positif secara signifikan tingkat serapan anggaran (SiLPA) terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 5) Terdapat pengaruh secara signifikan positif pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 6) Terdapat pengaruh secara signifikan positif pertumbuhan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 7) Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran.
- 8) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

- 9) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Karena dari enam kinerja yang di uji terdapat empat variabel (yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, pertumbuhan PAD dan pertumbuhan APBD) yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga apabila suatu daerah memiliki kinerja keuangan yang baik, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah tersebut.

## **V.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya obyek penelitian yang hanya terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 14 Kabupaten/Kota, sehingga hasil kesimpulan kurang dapat digeneralisasikan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi lainnya.

## **V.3 Saran**

1. Bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah hendaknya dapat meningkatkan rasio kemandirian,

efisiensi, pertumbuhan PAD dan pertumbuhan APBD, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya mengembangkan hasil penelitian ini dengan memperbanyak sampel penelitian dan memperluas obyek penelitian , misalnya Kabupaten/Kota se Pulau Sumatera, atau obyek lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal Ekonomi STE1 No. 2/Th. XIII/25/April-Juni 2004. Yogyakarta. Hlm. 90-109

Ace Suryadi, 1994, *Pengembangan Sumberdaya Manusia, Prisma, 3 Maret 1994*, Jakarta : LP3ES

Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan ekonomi daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)* Simposium Nasional Akuntansi IX Padang 23-26 Agustus 2006, Hal 1-21.

Adi, Priyo Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

Adi, Priyo Hari dan Susilo, Gideon Tri Budi. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi (studi Empiris di Provinsi Jawa Tengah)*. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik I, Surabaya.



Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 2003. *Analisis Elastisitas PAD Terhadap PDRB*. Jakarta: Bappenas.

Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial. 2002. *Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002*. Jakarta: BPS.

Barzelay. 1991. *Managing Local Development: Lessons from Spain*. XXIV:3, 271-290. Policy Sciences.

Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE. Yogyakarta

Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Budiarto, Bambang. 2007. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya

Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar

Darmawan, Iwan. 2010. *Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Anteseden (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten /Kota Provinsi Kalimantan Timur)*. FE UII Yogyakarta

Deddy, Mulyadi. 2003, *Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun 1998-2002*, Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

David Harianto , Priyo Hari Adi, 2007, *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita*, Jurnal SNA X Makasar.

Ferdinand, Augusty (2005), *Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen : Aplikasi Model-Model Rumit dalam Penelitian Untuk Tesis Magister dan Disertasi Doktor*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ghozali Imam, 2005, *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, BP. UNDIP Semarang.

Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta. Hal : 127 – 146.

Halim, Abdul. 2002. *Seri Akuntansi Publik – Akuntansi keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hamzah, Ardi. 2007, *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006)*, Jurnal SNA 11 Pontianak.

Hermanto, Siregar dan Wahyuniarti, Dwi. 2007. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*.  
Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta.

Hulland, et al., 1996, *Comparative Fit Index, Conclusion and Directions*, 1996

Kaho, Joseph Riwu, 1997, *Prospek Otonomi daerah di negara R*, Rajawali Pers,  
Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 2004, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga  
Jakarta.

Lee, Robert (1983), *Rural Development In Korea*, Longman London.

Lin dan Liu, 2002, *The Direction of Causality Between Financial Development  
and Economic Growth*. Working Papers Central Bank of Chile 184, Central  
Bank of Chile.

Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM  
YKPN, Yogyakarta.

Majidi, N. 1997, *Anggaran Pengembangan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah*, Prisma. LP3ES. Volume.3. Hal. 3-22.

Mardiasmo. 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI. Yogyakarta.

Medi, Setianus, 1996, *Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah propinsi Nusa Tenggara Timur*, Tesis S2 Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta

Putong, Iskandar. 2003. *Ekonomi Mikro dan Makro*. Edisi 2. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta

Preston, H. Samuel, 2004, *Demography: Measuring and Modelling Population Processes*, Blackwell USA.

Ranis, Rihandhini, 2004, *Pengaruh Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Sumatera*, FE UII Yogyakarta.

Riyanto, Bambang, 1995, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta

Sen, Anne, 1999, *Isu dan Konsep Desentralisasi*, dalam Anne Sen dkk (editor) *Desentralisasi Sistem Pelayanan Kesehatan*, Terjemahan Laksono Trisnantoro Gadjah Mada Press Yogyakarta.

Sukirno, Sadono. 1995, *Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Kebijakan*, Penerbit FE-UI dan Bina Grafika. Jakarta.

Samuelson, Paul, 1995. *Economic Theory and Mathematics — An Appraisal*, American Economic Review.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.

Sasana, Hadi, 2006, *Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan. Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*, Penerbit Ghalia Indonesia

Sidik, Machfud, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro, 2002, *Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Kompas Jakarta.

Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Daerah*. Wisuda Angkatan XXI STIA LAN Tahun Akademik 2001-2002. Orasi Ilmiah.

Tambunan, Tulus. 2006, *Upaya-Upaya Meningkatkan Daya Saing Daerah*, Kardin Indonesia Jakarta

Tanaka, 1993, *Economic Development Sixth Edition*, Published by New York University.

United Nations Development Program (UNDP). 1966, *Democracy and Human Development*, New York City: UNDP.

Wongdesmiwati. 2009, *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*, Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management. Fall. 16.3. 799-816.

*Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Selatan*

[www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com)

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

[www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)

## LAMPIRAN

### Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

(dalam ribuan rupiah)

Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
Ogan Komering Ulu	15,401,984	19,574,510	24,582,841	33,498,884
Ogan Komering Ilir	22,573,027	23,648,230	23,175,177	27,286,177
Muara Enim	39,552,771	40,559,667	46,765,502	56,053,045
Lahat	19,802,649	21,699,240	20,019,655	34,215,483
Musi Rawas	24,012,776	25,845,455	29,504,974	31,877,920
Musi Banyu Asin	29,182,321	42,001,150	28,288,643	31,372,488
Banyu Asin	11,302,688	15,903,690	13,565,258	12,584,066
Ogan Komering Ulu Selatan	12,562,325	10,866,950	13,224,364	13,167,984
Ogan Komering Ulu Timur	12,250,850	13,178,220	7,596,441	11,154,929
Ogan Ilir	11,740,510	12,945,764	13,031,581	12,080,240
Palembang	76,830,492	89,676,047	121,134,083	139,154,074
Prabumulih	13,608,711	14,899,779	15,737,784	16,457,793
Pagar Alam	4,727,334	5,669,850	6,870,439	7,132,766
Lubuklinggau	14,009,210	15,885,353	13,667,369	20,362,156



**Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**

**(dalam ribuan rupiah)**

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008
Ogan Komering Ulu	441,434,638	494,926,220	545,668,049
Ogan Komering Ilir	563,059,140	640,831,391	707,549,067
Muara Enim	548,701,301	612,376,656	740,892,304
Lahat	540,394,940	613,959,625	538,273,328
Musi Rawas	605,562,423	684,610,568	879,332,734
Musi Banyu Asin	1,085,604,450	1,222,066,034	1,228,674,972
Banyu Asin	560,738,260	626,644,893	698,639,723
Ogan Komering Ulu Selatan	422,261,160	350,606,530	402,071,603
Ogan Komering Ulu Timur	414,060,380	463,444,526	515,884,745
Ogan Ilir	376,472,218	443,457,843	484,625,001
Palembang	772,951,769	860,375,981	939,914,612
Prabumulih	298,183,391	308,122,068	362,860,671
Pagar Alam	258,629,720	298,867,891	344,181,278
Lubuklinggau	295,456,116	305,177,852	349,297,206

**PDRB atas harga konstan 2000 di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**

**(dalam miliar rupiah)**

Kabupaten/Kota	2006		2007		2008	
	PDRB	%	PDRB	%	PDRB	%
Ogan Komering Ulu	2,348	4,96	2,469	5,13	2,587	4,81
Ogan Komering Ilir	2,654	6,06	2,828	6,58	2,978	5,27
Muara Enim	6,897	5,44	7,300	5,85	7,714	5,67
Lahat	2,164	4,82	2,292	5,92	2,433	6,13
Musi Rawas	2,974	5,21	3,128	5,17	3,309	5,82
Musi Banyu Asin	10,261	2,79	10,541	2,73	10,828	2,72
Banyu Asin	3,801	6,28	4,035	6,17	4,254	5,42
Ogan Komering Ulu Selatan	1,027	8,71	1,078	4,91	1,135	5,32
Ogan Komering Ulu Timur	1,876	6,49	2,002	6,70	2,099	4,89
Ogan Ilir	1,422	5,17	1,493	5,01	1,567	5,01
Palembang	13,998	6,95	14,992	7,10	16,018	6,84
Prabumulih	1,154	4,55	1,208	4,74	1,272	5,28
Pagar Alam	518	3,79	538	3,99	558	3,64
Lubuklinggau	886	6,01	940	6,14	999	6,21

**Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008
Ogan Komering Ulu	70,86	71,40	71,92
Ogan Komering Ilir	69,03	69,15	69,64
Muara Enim	69,14	69,42	69,91
Lahat	68,43	69,35	69,99
Musi Rawas	65,65	66,31	66,77
Musi Banyu Asin	68,98	69,64	70,54
Banyu Asin	68,05	68,60	69,08
Ogan Komering Ulu Selatan	70,00	70,28	70,66
Ogan Komering Ulu Timur	67,50	68,14	68,88
Ogan Ilir	67,24	68,17	68,67
Palembang	74,35	74,94	75,49
Prabumulih	71,70	72,51	73,20
Pagar Alam	71,06	71,70	72,16
Lubuklinggau	67,97	69,24	69,69

**Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008
Ogan Komering Ulu	17,80	15,69	14,64
Ogan Komering Ilir	25,93	22,50	17,67
Muara Enim	21,88	19,87	17,98
Lahat	29,67	28,09	23,21
Musi Rawas	34,49	32,93	24,27
Musi Banyu Asin	35,52	33,60	25,45
Banyu Asin	19,81	17,72	15,38
Ogan Komering Ulu Selatan	21,06	18,96	14,56
Ogan Komering Ulu Timur	18,26	16,03	12,12
Ogan Ilir	22,67	21,57	17,78
Palembang	9,23	8,98	16,66
Prabumulih	9,33	7,57	15,39
Pagar Alam	11,88	9,75	10,23
Lubuklinggau	16,01	14,25	17,36

**Persentase Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008
Ogan Komering Ulu	8,45	8,97	8,76
Ogan Komering Ilir	7,29	8,57	7,31
Muara Enim	7,51	7,89	7,19
Lahat	4,27	4,95	4,48
Musi Rawas	3,79	4,54	2,58
Musi Banyu Asin	4,60	5,09	5,29
Banyu Asin	5,11	5,99	3,65
Ogan Komering Ulu Selatan	4,09	4,68	4,25
Ogan Komering Ulu Timur	7,88	8,84	8,22
Ogan Ilir	5,84	6,39	4,08
Palembang	18,57	19,43	16,89
Prabumulih	13,36	16,31	10,43
Pagar Alam	9,48	10,21	8,55
Lubuklinggau	17,67	18,19	15,54

**Target dan Realisasi PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**

**(dalam ribuan rupiah)**

Kabupaten/Kota	2006		2007		2008	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Ogan Komering Ulu	19,320,490	19,574,510	26,217,078	24,582,841	32,987,712	33,498,884
Ogan Komering Ilir	23,099,710	23,648,230	23,138,180	23,175,177	29,113,641	27,286,177
Muara Enim	39,806,471	40,559,667	48,650,334	46,765,502	54,235,111	56,053,045
Lahat	20,981,211	21,699,240	22,754,209	20,019,655	34,156,273	34,215,483
Musi Rawas	24,784,122	25,845,455	29,211,719	29,504,974	33,714,753	31,877,920
Musi Banyu Asin	40,809,697	42,001,150	30,550,781	28,288,643	34,582,979	31,372,488
Banyu Asin	15,554,740	15,903,690	16,472,189	13,565,258	16,574,887	12,584,066
Ogan Komering Ulu Selatan	9,982,775	10,866,950	13,095,865	13,224,364	14,100,643	13,167,984
Ogan Komering Ulu Timur	13,290,465	13,178,220	13,400,939	7,596,441	15,914,657	11,154,929
Ogan Ilir	12,785,411	12,945,764	14,729,266	13,031,581	15,233,416	12,080,240
Palembang	86,693,254	89,676,047	119,879,488	121,134,083	135,683,351	139,154,074
Prabumulih	14,655,908	14,899,779	16,790,506	15,737,784	17,954,436	16,457,793
Pagar Alam	5,719,870	5,669,850	6,573,418	6,870,439	8,377,434	7,132,766
Lubuklinggau	14,977,508	15,885,353	16,214,743	13,667,369	19,608,826	20,362,156

**Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**

**(dalam ribuan rupiah)**

Kabupaten/Kota	2006		2007		2008	
	Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Pengeluaran
Ogan Komering Ulu	463,722,579	460,584,404	545,445,530	558,388,514	601,405,647	637,233,879
Ogan Komering Ilir	589,456,370	575,762,950	699,471,422	688,989,476	770,912,298	802,948,086
Muara Enim	599,146,555	523,205,068	732,298,801	751,931,786	844,980,736	901,147,886
Lahat	567,094,180	529,956,960	673,741,683	758,718,060	591,726,384	659,430,186
Musi Rawas	631,413,693	529,028,533	757,248,858	791,387,374	952,025,183	923,259,094
Musi Banyu Asin	1,128,114,440	1,154,532,680	1,302,864,613	1,202,573,035	1,311,813,343	1,238,286,921
Banyu Asin	576,641,950	405,164,130	656,269,004	611,089,762	731,970,623	742,297,600
Ogan Komering Ulu Selatan	436,677,110	446,445,680	361,437,358	357,486,743	442,959,811	480,212,158
Ogan Komering Ulu Timur	427,238,600	397,928,680	508,063,727	519,922,284	564,279,555	566,585,344
Ogan Ilir	389,417,982	398,697,388	477,675,739	474,886,706	538,041,099	568,910,005
Palembang	891,173,700	848,524,987	1,094,633,897	1,130,516,949	1,177,276,456	1,249,189,067
Prabumulih	313,084,342	262,188,559	350,737,784	327,005,996	397,914,818	456,262,926
Pagar Alam	264,299,570	242,827,910	322,899,439	311,888,388	363,819,046	428,220,039
Lubuklinggau	311,341,469	291,745,894	337,660,369	387,420,669	525,816,468	438,716,286

**SiLPA di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**

**(dalam ribuan rupiah)**

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008
Ogan Komering Ulu	3,138,175	(12,942,984)	(35,828,232)
Ogan Komering Ilir	13,693,420	10,481,946	(32,035,788)
Muara Enim	75,941,487	(19,632,985)	(56,167,150)
Lahat	37,137,220	(84,976,377)	(67,703,802)
Musi Rawas	102,385,160	(34,138,516)	28,766,089
Musi Banyu Asin	(26,418,240)	100,291,578	73,526,422
Banyu Asin	171,477,820	45,179,242	(10,326,977)
Ogan Komering Ulu Selatan	(9,768,570)	3,950,615	(37,252,347)
Ogan Komering Ulu Timur	29,309,920	(11,858,557)	(2,305,789)
Ogan Ilir	(9,279,406)	2,789,033	(30,868,906)
Palembang	42,648,713	(35,883,052)	(71,912,611)
Prabumulih	50,895,783	23,731,788	(58,348,108)
Pagar Alam	21,471,660	11,011,051	(64,400,993)
Lubuklinggau	19,595,575	(49,760,300)	87,100,182



**Total APBD di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**

**(dalam ribuan rupiah)**

Kabupaten/Kota	2005	2006	2007	2008
Ogan Komering Ulu	459,144,781	518,363,160	603,192,580	646,142,692
Ogan Komering Ilir	526,811,649	637,874,680	759,908,737	827,276,205
Muara Enim	598,701,219	724,552,123	920,879,602	1,011,454,614
Lahat	507,547,881	653,799,540	782,739,403	700,341,347
Musi Rawas	629,797,642	706,802,119	931,537,594	1,090,804,095
Musi Banyu Asin	1,316,420,574	1,425,087,610	1,561,292,235	1,372,532,543
Banyu Asin	511,630,211	608,663,640	785,056,704	755,807,886
Ogan Komering Ulu Selatan	328,024,972	463,196,850	381,427,818	533,505,211
Ogan Komering Ulu Timur	385,577,408	465,308,030	523,002,600	567,823,438
Ogan Ilir	402,530,671	427,189,424	544,556,190	591,503,573
Palembang	885,939,785	970,054,762	1,216,552,505	1,346,455,480
Prabumulih	316,192,535	407,205,568	495,693,951	564,602,624
Pagar Alam	231,490,559	303,050,120	380,776,233	432,706,891
Lubuklinggau	296,973,679	392,082,431	435,288,491	525,816,468

### Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

No	Kabupaten/Kota	PAD			PENERIMAAN			Kemandirian (%)		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	Ogan Komering Ulu	19.574.510	24.582.841	33.498.884	463.722.579	545.445.530	601.405.647	4,22	4,51	5,57
2	Ogan Komering Ilir	23.648.230	23.175.177	27.286.177	589.456.370	699.471.422	770.912.298	4,01	3,31	3,54
3	Muara Enim	40.559.667	46.765.502	56.053.045	599.146.555	732.298.801	844.980.736	6,77	6,39	6,63
4	Lahat	21.699.240	20.019.655	34.215.483	567.094.180	673.741.683	591.726.384	3,83	2,97	5,78
5	Musi Rawas	25.845.455	29.504.974	31.877.920	631.413.693	757.248.858	952.025.183	4,09	3,90	3,35
6	Musi Banyu Asin	42.001.150	28.288.643	31.372.488	1.128.114.440	1.302.864.613	1.311.813.343	3,72	2,17	2,39
7	Banyu Asin	15.903.690	13.565.258	12.584.066	576.641.950	656.269.004	731.970.623	2,76	2,07	1,72
8	Ogan Komering Ulu Selatan	10.866.950	13.224.364	13.167.984	436.677.110	361.437.358	442.959.811	2,49	3,66	2,97
9	Ogan Komering Ulu Timur	13.178.220	7.596.441	11.154.929	427.238.600	508.063.727	564.279.555	3,08	1,50	1,98
10	Ogan Ilir	12.945.764	13.031.581	12.080.240	389.417.982	477.675.739	538.041.099	3,32	2,73	2,25
11	Palembang	89.676.047	121.134.083	139.154.074	891.173.700	1.094.633.897	1.177.276.456	10,06	11,07	11,82
12	Prabumulih	14.899.779	15.737.784	16.457.793	313.084.342	350.737.784	397.914.818	4,76	4,49	4,14
13	Pagar Alam	5.669.850	6.870.439	7.132.766	264.299.570	322.899.439	363.819.046	2,15	2,13	1,96
14	Lubuklinggau	15.885.353	13.667.369	20.362.156	311.341.469	337.660.369	525.816.468	5,10	4,05	3,87

### Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas

No	Kabupaten/Kota	PAD			Target Penerimaan PAD			Efektifitas (%)		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	Ogan Komering Ulu	19.574.510	24.582.841	33.498.884	19.320.490	26.217.078	32.987.712	101,31	93,77	101,55
2	Ogan Komering Ilir	23.648.230	23.175.177	27.286.177	23.099.710	23.138.180	29.113.641	102,37	100,16	93,72
3	Muara Enim	40.559.667	46.765.502	56.053.045	39.806.471	48.650.334	54.235.111	101,89	96,13	103,35
4	Lahat	21.699.240	20.019.655	34.215.483	20.981.211	22.754.209	34.156.273	103,42	87,98	100,17
5	Musi Rawas	25.845.455	29.504.974	31.877.920	24.784.122	29.211.719	33.714.753	104,28	101,00	94,55
6	Musi Banyu Asin	42.001.150	28.288.643	31.372.488	40.809.697	30.550.781	34.582.979	102,92	92,60	90,72
7	Banyu Asin	15.903.690	13.565.258	12.584.066	15.554.740	16.472.189	16.574.887	102,24	82,35	75,92
8	Ogan Komering Ulu Selatan	10.866.950	13.224.364	13.167.984	9.982.775	13.095.865	14.100.643	108,86	100,98	93,39
9	Ogan Komering Ulu Timur	13.178.220	7.596.441	11.154.929	13.290.465	13.400.939	15.914.657	99,16	56,69	70,09
10	Ogan Ilir	12.945.764	13.031.581	12.080.240	12.785.411	14.729.266	15.233.416	101,25	88,47	79,30
11	Palembang	89.676.047	121.134.083	139.154.074	86.693.254	119.879.488	135.683.351	103,44	101,05	102,56
12	Prabumulih	14.899.779	15.737.784	16.457.793	14.655.908	16.790.506	17.954.436	101,66	93,73	91,66
13	Pagar Alam	5.669.850	6.870.439	7.132.766	5.719.870	6.573.418	8.377.434	99,13	104,52	85,14
14	Lubuklinggau	15.885.353	13.667.369	20.362.156	14.977.508	16.214.743	19.608.826	106,06	84,29	103,84

### Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Pengeluaran			Realisasi Penerimaan			Efisiensi (%)		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	Ogan Komering Ulu	460.584.404	558.388.514	637.233.879	463.722.579	545.445.530	601.405.647	99,32	102,37	105,96
2	Ogan Komering Ilir	575.762.950	688.989.476	802.948.086	589.456.370	699.471.422	770.912.298	97,68	98,50	104,16
3	Muara Enim	523.205.068	751.931.786	901.147.886	599.146.555	732.298.801	844.980.736	87,33	102,68	106,65
4	Lahat	529.956.960	758.718.060	659.430.186	567.094.180	673.741.683	591.726.384	93,45	112,61	111,44
5	Musi Rawas	529.028.533	791.387.374	923.259.094	631.413.693	757.248.858	952.025.183	83,78	104,51	96,98
6	Musi Banyu Asin	1.154.532.680	1.202.573.035	1.238.286.921	1.128.114.440	1.302.864.613	1.311.813.343	102,34	92,30	94,40
7	Banyu Asin	405.164.130	611.089.762	742.297.600	576.641.950	656.269.004	731.970.623	70,26	93,12	101,41
8	Ogan Komering Ulu Selatan	446.445.680	357.486.743	480.212.158	436.677.110	361.437.358	442.959.811	102,24	98,91	108,41
9	Ogan Komering Ulu Timur	397.928.680	519.922.284	566.585.344	427.238.600	508.063.727	564.279.555	93,14	102,33	100,41
10	Ogan Ilir	398.697.388	474.886.706	568.910.005	389.417.982	477.675.739	538.041.099	102,38	99,42	105,74
11	Palembang	848.524.987	1.130.516.949	1.249.189.067	891.173.700	1.094.633.897	1.177.276.456	95,21	103,28	106,11
12	Prabumulih	262.188.559	327.005.996	456.262.926	313.084.342	350.737.784	397.914.818	83,74	93,23	114,66
13	Pagar Alam	242.827.910	311.888.388	428.220.039	264.299.570	322.899.439	363.819.046	91,88	96,59	117,70
14	Lubuklinggau	291.745.894	387.420.669	438.716.286	311.341.469	337.660.369	525.816.468	93,71	114,74	83,44

### Hasil Perhitungan Pertumbuhan PAD

No	Kabupaten/Kota	PAD				Pertumbuhan PAD (%)		
		2006	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	Ogan Komering Ulu	15.401.984	19.574.510	24.582.841	33.498.884	27,090835	25,585984	36,269376
2	Ogan Komering Ilir	22.573.027	23.648.230	23.175.177	27.286.177	4,7632203	-2,0003738	17,738807
3	Muara Enim	39.552.771	40.559.667	46.765.502	56.053.045	2,5457028	15,300508	19,859817
4	Lahat	19.802.649	21.699.240	20.019.655	34.215.483	9,5774611	-7,7402941	70,909454
5	Musi Rawas	24.012.776	25.845.455	29.504.974	31.877.920	7,6320997	14,159236	8,0425287
6	Musi Banyu Asin	29.182.321	42.001.150	28.288.643	31.372.488	43,926695	-32,647932	10,901354
7	Banyu Asin	11.302.688	15.903.690	13.565.258	12.584.066	40,707149	-14,703707	-7,2331245
8	Ogan Komering Ulu Selatan	12.562.325	10.866.950	13.224.364	13.167.984	-13,49571	21,693428	-0,4263343
9	Ogan Komering Ulu Timur	12.250.850	13.178.220	7.596.441	11.154.929	7,5698421	-42,356092	46,844147
10	Ogan Ilir	11.740.510	12.945.764	13.031.581	12.080.240	10,265772	0,6628964	-7,3002731
11	Palembang	76.830.492	89.676.047	121.134.083	139.154.074	16,719345	35,079642	14,87607
12	Prabumulih	13.608.711	14.899.779	15.737.784	16.457.793	9,4870705	5,6242781	4,5750342
13	Pagar Alam	4.727.334	5.669.850	6.870.439	7.132.766	19,93758	21,174969	3,8181985
14	Lubuklinggau	14.009.210	15.885.353	13.667.369	20.362.156	13,392211	-13,962447	48,983729

### Hasil Perhitungan Pertumbuhan APBD

No	Kabupaten/Kota	APBD				Pertumbuhan APBD (%)		
		2006	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	Ogan Komering Ulu	459.144.781	518.363.160	603.192.580	646.142.692	12,897539	16,364863	7,1204642
2	Ogan Komering Ilir	526.811.649	637.874.680	759.908.737	827.276.205	21,082114	19,131353	8,8652051
3	Muara Enim	598.701.219	724.552.123	920.879.602	1.011.454.614	21,020653	27,096391	9,8357062
4	Lahat	507.547.881	653.799.540	782.739.403	700.341.347	28,815342	19,72162	-10,526882
5	Musi Rawas	629.797.642	706.802.119	931.537.594	1.090.804.095	12,22686	31,796095	17,097163
6	Musi Banyu Asin	1.316.420.574	1.425.087.610	1.561.292.235	1.372.532.543	8,2547355	9,5576317	-12,089965
7	Banyu Asin	511.630.211	608.663.640	785.056.704	755.807.886	18,965539	28,980385	-3,725695
8	Ogan Komering Ulu Selatan	328.024.972	463.196.850	381.427.818	533.505.211	41,207801	-17,653193	39,870556
9	Ogan Komering Ulu Timur	385.577.408	465.308.030	523.002.600	567.823.438	20,67824	12,399221	8,5699073
10	Ogan Ilir	402.530.671	427.189.424	544.556.190	591.503.573	6,1259315	27,474174	8,6212192
11	Palembang	885.939.785	970.054.762	1.216.552.505	1.346.455.480	9,494435	25,410704	10,677959
12	Prabumulih	316.192.535	407.205.568	495.693.951	564.602.624	28,784055	21,730642	13,901455
13	Pagar Alam	231.490.559	303.050.120	380.776.233	432.706.891	30,912518	25,64794	13,638104
14	Lubuklinggau	296.973.679	392.082.431	435.288.491	525.816.468	32,025987	11,019637	20,797237

### Hasil Perhitungan SiLPA, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran

No	Kabupaten/Kota	SiLPA			Pertumbuhan Ekonomi			Tingkat Pengangguran		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	Ogan Komering Ulu	3.138.175	-12.942.984	-35.828.232	4,96	5,13	4,81	8,45	8,97	8,76
2	Ogan Komering Ilir	13.693.420	10.481.946	-32.035.788	6,06	6,58	5,27	7,29	8,57	7,31
3	Muara Enim	75.941.487	-19.632.985	-56.167.150	5,44	5,85	5,67	7,51	7,89	7,19
4	Lahat	37.137.220	-84.976.377	-67.703.802	4,82	5,92	6,13	4,27	4,95	4,48
5	Musi Rawas	102.385.160	-34.138.516	28.766.089	5,21	5,17	5,82	3,79	4,54	2,58
6	Musi Banyu Asin	-26.418.240	100.291.578	73.526.422	2,79	2,73	2,72	4,60	5,09	5,29
7	Banyu Asin	171.477.820	45.179.242	-10.326.977	6,28	6,17	5,42	5,11	5,99	3,65
8	Ogan Komering Ulu Selatan	-9.768.570	3.950.615	-37.252.347	8,71	4,91	5,32	4,09	4,68	4,25
9	Ogan Komering Ulu Timur	29.309.920	-11.858.557	-2.305.789	6,49	6,7	4,89	7,88	8,84	8,22
10	Ogan Ilir	-9.279.406	2.789.033	-30.868.906	5,17	5,01	5,01	5,84	6,39	4,08
11	Palembang	42.648.713	-35.883.052	-71.912.611	6,95	7,1	6,84	18,57	19,43	16,89
12	Prabumulih	50.895.783	23.731.788	-58.348.108	4,55	4,74	5,28	13,36	16,31	10,43
13	Pagar Alam	21.471.660	11.011.051	-64.400.993	3,79	3,99	3,64	9,48	10,21	8,55
14	Lubuklinggau	19.595.575	-49.760.300	87.100.182	6,01	6,14	6,21	17,67	18,19	15,54

### Hasil Perhitungan Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia

No	Kabupaten/Kota	Kemiskinan (%)			Indeks Pembangunan Manusia		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	Ogan Komering Ulu	17,8	15,69	14,64	70,86	71,4	71,92
2	Ogan Komering Ilir	25,93	22,5	17,67	69,03	69,15	69,64
3	Muara Enim	21,88	19,87	17,98	69,14	69,42	69,91
4	Lahat	29,67	28,09	23,21	68,43	69,35	69,99
5	Musi Rawas	34,49	32,93	24,27	65,65	66,31	66,77
6	Musi Banyu Asin	35,52	33,6	25,45	68,98	69,64	70,54
7	Banyu Asin	19,81	17,72	15,38	68,05	68,6	69,08
8	Ogan Komering Ulu Selatan	21,06	18,96	14,56	70	70,28	70,66
9	Ogan Komering Ulu Timur	18,26	16,03	12,12	67,5	68,14	68,88
10	Ogan Ilir	22,67	21,57	17,78	67,24	68,17	68,67
11	Palembang	9,23	8,98	16,66	74,35	74,94	75,49
12	Prabumulih	9,33	7,57	15,39	71,7	72,51	73,2
13	Pagar Alam	11,88	9,75	10,23	71,06	71,7	72,16
14	Lubuklinggau	16,01	14,25	17,36	67,97	69,24	69,69



## HASIL OLAHAN

### Analysis Summary

#### Date and Time

Date: Friday, January 06, 2012  
Time: 5:56:30 PM

#### Title

Amos: Friday, January 06, 2012 05:56 PM

#### Groups

##### Group number 1 (Group number 1)

##### Notes for Group (Group number 1)

The model is recursive.  
Sample size = 42

##### Variable Summary (Group number 1)

##### Your model contains the following variables (Group number 1)

Observed, endogenous variables

PE  
Pengangguran  
IPM  
Kemiskinan

Observed, exogenous variables

Kemandirian  
Efektifitas  
Efisiensi  
SiLPA  
P\_PAD  
P\_APBD

Unobserved, exogenous variables

z1  
z2  
z3  
z4

##### Variable counts (Group number 1)

Number of variables in your model:	14
Number of observed variables:	10
Number of unobserved variables:	4
Number of exogenous variables:	10
Number of endogenous variables:	4

**Parameter summary (Group number 1)**

	Weights	Covariances	Variances	Means	Intercepts	Total
Fixed	4	0	0	0	0	4
Labeled	0	0	0	0	0	0
Unlabeled	9	15	10	0	0	34
Total	13	15	10	0	0	38

**Assessment of normality (Group number 1)**

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
P_APB	-17.653	41.208	-.525	-1.388	.480	.635
P_PAD	-42.356	70.909	.174	.461	.872	1.154
SiLPA	-84976377.000	171477820.000	.812	2.148	.790	1.046
Efisiensi	70.263	117.701	-.570	-1.508	.956	1.264
Efektifitas	56.686	108.857	-1.673	-4.427	2.978	3.940
Kemandirian	1.495	11.820	1.808	4.783	3.156	4.175
PE	2.720	8.710	-.175	-.463	.808	1.068
Kemiskinan	7.570	35.520	.610	1.615	-.167	-.221
IPM	65.650	75.490	.641	1.696	.362	.478
Pengangguran	2.580	19.430	1.074	2.842	.025	.033
Multivariate					22.956	4.801

**Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)**

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
42	22.739	.012	.391
8	22.237	.014	.116
7	21.152	.020	.052
41	20.101	.028	.031
27	19.405	.035	.016
23	18.644	.045	.011
39	17.254	.069	.024
28	16.468	.087	.027
32	15.681	.109	.035
11	15.388	.119	.023
6	14.377	.157	.054
13	13.958	.175	.052
20	13.813	.182	.031
25	13.101	.218	.057
14	12.394	.260	.105
5	11.660	.308	.196
12	10.311	.414	.604
34	10.303	.414	.484
36	10.168	.426	.421
19	9.689	.468	.519
26	8.754	.556	.811
18	7.591	.669	.983
35	7.326	.694	.985

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
9	7.315	.695	.969
33	7.195	.707	.957
29	7.179	.708	.923
3	7.093	.717	.889
37	7.059	.720	.827
16	6.230	.796	.965
10	5.666	.842	.990
21	5.295	.871	.994
40	5.214	.876	.989
31	4.483	.923	.999
2	4.239	.936	.999
17	3.722	.959	1.000
22	3.480	.968	1.000
4	3.029	.981	1.000
38	2.727	.987	1.000
24	2.620	.989	.999
15	2.482	.991	.994
1	1.299	.999	1.000
30	1.159	1.000	.986

**Models**

**Default model (Default model)**

**Notes for Model (Default model)**

**Computation of degrees of freedom (Default model)**

Number of distinct sample moments: 55  
Number of distinct parameters to be estimated: 34  
Degrees of freedom (55 - 34): 21

**Result (Default model)**

Minimum was achieved  
Chi-square = 48.685  
Degrees of freedom = 21  
Probability level = .001

**Group number 1 (Group number 1 - Default model)**

**Estimates (Group number 1 - Default model)**

**Scalar Estimates (Group number 1 - Default model)**

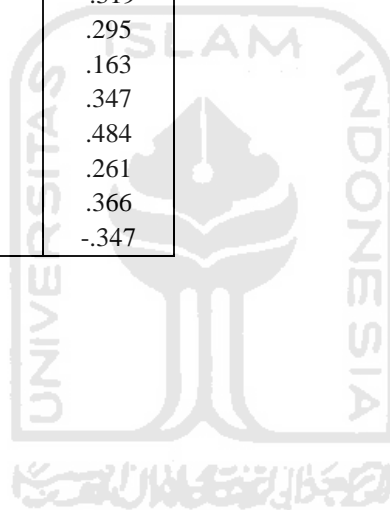
**Maximum Likelihood Estimates**

**Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
PE	<---	Kemandirian	.162	.071	2.298	.022	
PE	<---	Efektifitas	-.036	.019	-1.939	.053	
PE	<---	Efisiensi	.038	.018	2.053	.040	
PE	<---	SiLPA	.000	.000	1.108	.268	
PE	<---	P_PAD	.019	.008	2.297	.022	
PE	<---	P_APBD	.046	.011	3.996	***	
Pengangguran	<---	PE	1.018	.588	1.732	.083	
IPM	<---	PE	.661	.263	2.517	.012	
Kemiskinan	<---	PE	-2.075	.875	-2.371	.018	

**Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model)**

			Estimate
PE	<---	Kemandirian	.316
PE	<---	Efektifitas	-.319
PE	<---	Efisiensi	.295
PE	<---	SiLPA	.163
PE	<---	P_PAD	.347
PE	<---	P_APBD	.484
Pengangguran	<---	PE	.261
IPM	<---	PE	.366
Kemiskinan	<---	PE	-.347



**Covariances: (Group number 1 - Default model)**

		Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Kemandirian <-->	P_APBD	1.128	4.556	.248	.804	
Efektifitas <-->	P_APBD	24.637	20.973	1.175	.240	
Efisiensi <-->	P_APBD	-4.665	18.212	-.256	.798	
SiLPA <-->	P_APBD	33543806.536	104426810.234	.321	.748	
P_PAD <-->	P_APBD	-24.482	41.760	-.586	.558	
SiLPA <-->	P_PAD	-53221055.948	175360760.768	-.303	.762	
Efisiensi <-->	P_PAD	39.196	31.170	1.258	.209	
Efektifitas <-->	P_PAD	125.478	39.787	3.154	.002	
Kemandirian <-->	P_PAD	18.905	8.196	2.306	.021	
Efisiensi <-->	SiLPA	-276615313.489	87986823.763	-3.144	.002	
Efektifitas <-->	SiLPA	123031288.544	88944539.750	1.383	.167	
Kemandirian <-->	SiLPA	-23795886.695	19533407.982	-1.218	.223	
Efektifitas <-->	Efisiensi	-4.821	15.171	-.318	.751	
Kemandirian <-->	Efisiensi	5.228	3.444	1.518	.129	
Kemandirian <-->	Efektifitas	10.561	4.134	2.555	.011	

**Correlations: (Group number 1 - Default model)**

		Estimate
Kemandirian <-->	P_APBD	.039
Efektifitas <-->	P_APBD	.187
Efisiensi <-->	P_APBD	-.040
SiLPA <-->	P_APBD	.050
P_PAD <-->	P_APBD	-.092
SiLPA <-->	P_PAD	-.047
Efisiensi <-->	P_PAD	.200
Efektifitas <-->	P_PAD	.566
Kemandirian <-->	P_PAD	.386
Efisiensi <-->	SiLPA	-.564
Efektifitas <-->	SiLPA	.221
Kemandirian <-->	SiLPA	-.194
Efektifitas <-->	Efisiensi	-.050
Kemandirian <-->	Efisiensi	.244
Kemandirian <-->	Efektifitas	.435

**Variances: (Group number 1 - Default model)**

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Kemandirian	5.360	1.184	4.528	***	
Efektifitas	109.926	24.279	4.528	***	
Efisiensi	85.636	18.914	4.528	***	
SiLPA	2812979482787560.000	621283234202926.000	4.528	***	
P_PAD	447.204	98.771	4.528	***	
P_APBD	158.543	35.016	4.528	***	
z1	.767	.169	4.528	***	
z2	19.945	4.405	4.528	***	
z3	3.986	.880	4.528	***	
z4	44.176	9.757	4.528	***	

**Matrices (Group number 1 - Default model)**

**Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	P_APBD	P_PAD	SiLPA	Efisiensi	Efektifitas	Kemandirian	PE
PE	.046	.019	.000	.038	-.036	.162	.000
Kemiskinan	-.095	-.040	.000	-.079	.075	-.336	-2.075
IPM	.030	.013	.000	.025	-.024	.107	.661
Pengangguran	.046	.020	.000	.039	-.037	.165	1.018

**Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model)**

	P_APBD	P_PAD	SiLPA	Efisiensi	Efektifitas	Kemandirian	PE
PE	.484	.347	.163	.295	-.319	.316	.000
Kemiskinan	-.168	-.121	-.057	-.103	.111	-.110	-.347
IPM	.177	.127	.060	.108	-.117	.116	.366
Pengangguran	.126	.091	.043	.077	-.083	.083	.261

**Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	P_APBD	P_PAD	SiLPA	Efisiensi	Efektifitas	Kemandirian	PE
PE	.046	.019	.000	.038	-.036	.162	.000
Kemiskinan	.000	.000	.000	.000	.000	.000	-2.075
IPM	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.661
Pengangguran	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.018

**Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model)**

	P_APBD	P_PAD	SiLPA	Efisiensi	Efektifitas	Kemandirian	PE
PE	.484	.347	.163	.295	-.319	.316	.000
Kemiskinan	.000	.000	.000	.000	.000	.000	-.347
IPM	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.366
Pengangguran	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.261

**Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	P_APBD	P_PAD	SiLPA	Efisiensi	Efektifitas	Kemandirian	PE
PE	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Kemiskinan	-.095	-.040	.000	-.079	.075	-.336	.000
IPM	.030	.013	.000	.025	-.024	.107	.000
Pengangguran	.046	.020	.000	.039	-.037	.165	.000

**Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model)**

	P_APBD	P_PAD	SiLPA	Efisiensi	Efektifitas	Kemandirian	PE
PE	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Kemiskinan	-.168	-.121	-.057	-.103	.111	-.110	.000
IPM	.177	.127	.060	.108	-.117	.116	.000
Pengangguran	.126	.091	.043	.077	-.083	.083	.000

**Minimization History (Default model)**

Iteration	Negative eigenvalues	Condition #	Smallest eigenvalue	Diameter	F	NTries	Ratio
0	e	4	-.300	9999.000	134.634	0	9999.000
1	e*	0	141.315	.879	68.931	18	.903
2	e	0	36.569	.426	57.473	3	.000
3	e	0	32.385	.441	49.639	1	1.039
4	e	0	42.540	.217	48.724	1	1.112
5	e	0	47.661	.062	48.685	1	1.044
6	e	0	47.711	.005	48.685	1	1.004
7	e	0	47.883	.000	48.685	1	1.000

### Model Fit Summary

#### CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	34	48.685	21	.001	2.318
Saturated model	55	.000	0		
Independence model	10	143.733	45	.000	3.194

#### RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	7957591.522	.910	.803	.709
Saturated model	.000	1.000		
Independence model	43127030.114	.568	.472	.465

#### Baseline Comparisons

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	.861	.674	.874	.909	.920
Saturated model	1.000		1.000		1.000
Independence model	.000	.000	.000	.000	.000

#### Parsimony-Adjusted Measures

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	.467	.309	.336
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	1.000	.000	.000

#### NCP

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	27.685	11.096	51.980
Saturated model	.000	.000	.000
Independence model	98.733	66.251	138.830

#### FMIN

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	1.187	.675	.271	1.268
Saturated model	.000	.000	.000	.000
Independence model	3.506	2.408	1.616	3.386



**RMSEA**

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	.079	.114	.246	.002
Independence model	.231	.189	.274	.000

**AIC**

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	116.685	141.618	175.765	209.765
Saturated model	110.000	150.333	205.572	260.572
Independence model	163.733	171.066	181.110	191.110

**ECVI**

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	2.846	2.441	3.439	3.454
Saturated model	2.683	2.683	2.683	3.667
Independence model	3.993	3.201	4.971	4.172

**HOELTER**

Model	HOELTER .05	HOELTER .01
Default model	28	33
Independence model	18	20

**Execution time summary**

Minimization: .016  
 Miscellaneous: .078  
 Bootstrap: .000  
 Total: .094

## SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



### UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283  
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 385/DEK/10/Div.SDM/XII/2011  
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

13 Desember 2011

Kepada Yth.  
Badan Pusat Statistik  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Hendry Wijaya  
No. Mahasiswa : 08 312 002  
Jurusan : Akuntansi  
Alamat : Jl.Mancasan Indah IV No.10,Condong Catur,Sleman

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi judul. **"Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Antecedent (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan) "**

Dosen Pembimbing : Mahmudi, SE.,M.Si

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA  
NIP. 88 312 0104